

Laporan Kinerja Tahun 2024



*Ginas Perhubungan
Kab. Tanah Laut*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur sepantasnya kita haturkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat kuasa dan ijin-Nya jualah Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 dapat diselesaikan pada waktunya. LKj tersebut merupakan media pertanggungjawaban kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut 2024-2026.

LKj dapat digunakan oleh setiap aparatur mulai dari staf sampai pimpinan puncak instansi atau unit kerja yang peduli akan kinerja instansinya sehingga akan memperoleh manfaat dari LKj ini, dan dapat dipakai untuk melaksanakan strategi guna meningkatkan kinerja instansi Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut.

Akhirnya kami mengharapkan agar LKj ini oleh setiap jajaran pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut khususnya dan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut pada umumnya dapat dijadikan bahan oleh para perencana/penata program untuk mengimplementasikan perencanaan kinerja dalam rangka penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pelaihari, 21 Pebruari 2025

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TANAH LAUT,**



RINGKASAN EKSEKUTIF

Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut mempunyai tugas Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang perhubungan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah guna mendukung Bupati Tanah Laut dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah .

Program dan kegiatan Dinas Perhubungan yang dilaksanakan di Tahun 2024 diselenggarakan guna mendukung perencanaan pembangunan sektor perhubungan diantaranya Sektor Perhubungan Darat, Sektor Perhubungan Laut, sungai danau dan Penyeberangan, dan pelayanan publik di Terminal dan perparkiran, Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor serta Pelabuhan dan Penyeberangan.

Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut tahun 2024 merupakan pengukuran dan evaluasi capaian kinerja Dinas Perhubungan untuk Periode Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 dan Review Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2024-2026.

Pada APBD tahun 2024 Dinas Perhubungan memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp. 51.308.313.479,00 dengan target Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 527.600.000,00. Realisasi belanja yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp. 45.422.261.040,00 dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) anggaran sebesar Rp. 5.886.052.439,00 (*Lima milyar delapan ratus delapa puluh enam juta lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah*).

Pada tahun 2024 ini realisasi pendapatan asli daerah (PAD) hanya mencapai 90,44% dari yang ditargetkan atau terealisasi sebesar Rp. 477.150.000,00, terdiri dari Retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum Rp. 90.600.000,00 dan Retribusi tempat khusus parkir sebesar Rp. 386.550.000,00.

Pencapaian sasaran strategis dan target indikator kinerja utama Dinas Perhubungan yang telah ditetapkan yaitu sebanyak tiga indikator kinerja utama. Capaian ketiga indikator tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :



1. Indikator kinerja **volume capacity ratio** dengan target rasio 0,4 setelah dilakukan survey traffic counting kelancaran lalu lintas tercapai dengan rasio 0,57. Pelaksanaan survey dilakukan di 3 ruas jalan nasional, dan 4 ruas jalan provinsi, menunjukkan bahwa kealancaran lalu lintas di kabupaten Tanah Laut masih dalam kondisi yang lancar aman dan terkendali;
2. Indikator kinerja **Angka Kecelakaan** khususnya angkutan tanah laut (LAKATAN) dan angkutan pelajar (LANGKAR) tidak ada kejadian kecelakaan dalam kurun waktu 2024 atau *ZERO ACCIDENT*, dengan demikian capaian 100%
3. Indikator kinerja **persentase daerah yang terlayani transportasi umum**, menargetkan sekitar 55% daerah yang terlayani transportasi angkutan umum dari jumlah kecamatan yang ada di kabupaten tanah laut. Capaian indikator ini mencapai 100%. Adapun daerah-daerah yang telah tersedia transportasi angkutan umumnya yaitu dengan rute :
 - Pelaihari - Tabanio (Kec. Takisung)
 - Pelaihari - Batakan (Kec. Panyipatan)
 - Pelaihari - Jorong (Kec. Jorong)
 - Pelaihari – Bati-Bati (angkutan umum Feeder) Tarif GRATIS
 - Pelaihari – Sei Jelai (Kec. Tambang Ulang) Tarif GRATIS
 - Pelaihari- Bajuin Tarif GRATIS



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	ii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	1
C. Dasar Hukum	2
D. Cascading Kinerja	3
E. Proses Bisnis, Tugas Fungsi , dan Struktur Organisasi,	4
F. Isu Strategis	12
G. Dukungan SDM, Saran Prasarana dan Anggaran	13
H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun sebelumnya	17
I. Sistematika Penyajian	18
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	20
A. Tujuan, Sasaran Kabupaten.....	20
B. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah.....	21
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	25
D. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja	32
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	39
A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi.....	39
B. Akuntabilitas Keuangan.....	53
1. Anggaran dan Realisasi APBD 2024	53
2. Anggaran dan Realisasi menurut Sasaran dan Program	54
3. Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2023 dan 2024	58
BAB IV. PENUTUP	59
A. Simpulan	59
B. Strategi Peningkatan Kinerja	60



Lampiran :

1. IKU
2. Pernyataan hasil review
3. Pernyataan perjanjian kinerja 2023
4. Cascading / pohon kinerja
5. Capaian Per Triwulan (1-4)
6. Monev Renstra
7. Matrik keselarasan



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data PNS dan PTT Dishub Tahun 2024	13
Tabel 1.2	Jumlah PNS menurut tingkat golongan	14
Tabel 1.3	Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan	14
Tabel 1.4	Jumlah PNS menurut tingkat jabatan	15
Tabel 1.5	Kondisi Sarana dan Prasara Perhubungan Tahun 2024.....	16
Tabel 1.6	Total Anggaran Dinas Perhubungan Tahun 2024.....	16
Tabel 1.7	Matrik Tindak Lanjut Evaluasi SAKIP	16
Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan	23
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama Tahun 2024	24
Tabel 2.3	Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2024	25
Tabel 2.4	Perjanjian / penetapan Kinerja Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024	26
Tabel 2.5	Perjanjian Kinerja Eselon III	26
Tabel 2.6	Perjanjian Kinerja Eselon IV	27
Tabel 2.7	Program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2024.....	32
Tabel 3.1	Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perhubungan	40
Tabel 3.2	Pencapaian Indikator Kinerja Utama Terhadap RENSTRA.	41
Tabel 3.3	Realisasi Indikator Kinerja Utama Kepala Dinas	42
Tabel 3.4	Perbandingan realisasi dengan target tahunan.	42
Tabel 3.5	Data Hasil Survey Traffic Counting.	43
Tabel 3.6	Perbandingan dengan realisasi tahun-tahun sebelumnya	46
Tabel 3.7	Perbandingan dengan target kinerja renstra.....	47
Tabel 3.8	Perbandingan realisasi tahun 2024 dengan realisasi tahun 2023.....	48
Tabel 3.9	Efisiensi Penggunaan Anggaran	51
Tabel 3.10	Perbandingan jumlah program dan kegiatan tahun 2023 dengan tahun 2022.....	52
Tabel 3.11	Realisasi APBD SKPD Tahun 2024	53
Tabel 3.12	Realisasi Anggaran menurut Sasaran dan Program Tahun 2024.....	54
Tabel 3.13	Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2023 dan 2024	58



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai salah satu prasyarat terciptanya Pemerintahan yang baik dan terpercaya, dibutuhkan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mengintegrasikan sistem perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pelaporan dan evaluasi dari program dan kegiatan dari unit kerja yang kemudian dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perhubungan Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang diamanahkan kepada Kepala Dinas Perhubungan atas penggunaan seluruh sumber daya yang melibatkan Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana serta Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2024.

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perhubungan Tahun 2024 menyajikan gambaran secara transparan atas capaian kinerja selama Tahun Anggaran 2024 sebagai upaya strategis yang optimal dijalankan oleh Dinas Perhubungan guna mewujudkan Visi dan Misi Daerah Kabupaten Tanah Laut. Dengan melalui Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Perhubungan.

Guna mengukur capaian kinerja dari setiap kegiatan yang mendukung pemenuhan Sasaran Strategis, dilakukan pengukuran kinerja, dimana capaian kinerja tahun anggaran 2024 dibandingkan dengan rencana kinerja yang telah disesuaikan dengan DPA Tahun 2024 beserta revisinya, sebagai tolok ukur keberhasilan Dinas Perhubungan, serta dengan membandingkan capaian kinerja tahun 2024 terhadap rencana kinerja, akan dapat ditemukan selisih sejumlah celah kinerja (*performance gap*) guna perbaikan kinerja dimasa mendatang.

B. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja (LKj) merupakan sarana bagi instansi pemerintah untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang telah dicapai dan bagaimana



proses pencapaian berkaitan dengan mandat yang telah diterima instansi tersebut. Adapun maksud penyusunan LKj tahun 2024 ini adalah:

- a. Untuk mengetahui program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2024.
- b. Untuk mengukur tingkat pencapaian atau keberhasilan dan kegagalan sasaran strategis yang telah dilaksanakan selama tahun 2024.
- c. Sebagai dasar untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahun berikutnya.
- d. Sebagai bahan evaluasi kinerja instansi Pemerintah Daerah.
- e. Sebagai bahan laporan Kinerja Pimpinan

Tujuan penyusunan dan penyampaian LKj adalah :

- a. Untuk mewujudkan akuntabilitas/pertanggungjawaban instansi pemerintah kepada pihak-pihak yang memberi mandat/amanah;
- b. Untuk pengambilan keputusan dan pelaksanaan perubahan-perubahan ke arah perbaikan, untuk efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta anggaran;
- c. Upaya perbaikan dan peningkatan kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut di masa yang akan datang.

C. Dasar Hukum

Adapun Dasar Hukum yang mendasari Kegiatan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
2. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi SAKIP.
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi.



D. Cascading Kinerja

Gambaran cascading kinerja pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut digambarkan dalam bentuk urutan tingkatan berjenjang dari tujuan, sasaran, dan indikator eselon II sampai dengan eselon IV.

Bagan cascading kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut terlampir.



E. Proses Bisnis, Tugas Fungsi, dan Struktur Organisasi

a) Proses Bisnis

Peta Proses Bisnis Dinas Perhubungan

Visi : Terwujudnya transportasi tanah laut yang Manteb (Memadai, Aman, Nyaman, Terjangkau, Edukasi, dan Berkeselamatan)

Misi : 1. Terbukanya jaringan transportasi laut yang memenuhi standar nasional dan internasional
 2. Terwujudnya transportasi yang aman, nyaman, tertib, dan terkendali
 3. Tersedianya sarana dan prasarana aparatura yang memadai
 4. Meningkatkan disiplin aparatur dan sdm perhubungan sesuai kompetensi dan kualifikasinya
 5. Mengoptimalkan kegiatan dan pengelolaan administrasi keuangan dan ketatausahaan

	UTAMA		PENDUKUNG
PROGRAM	1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	2. Program Pengelolaan Pelayaran	3. Program Penunjang Pemerintah Daerah
KEGIATAN	1.1 Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	2.1 Kegiatan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	3.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	1.2 Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	2.2 Kegiatan Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	3.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	1.3 Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota		3.3 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
	1.4 Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C		3.4 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	1.5 Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir		3.5 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	1.6 Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		3.6 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

	NO.	KEGIATAN	RELASI		
UTAMA	1.1	Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Kepala Dinas	Sekretaris	Kepala Bidang Lalu Lintas & Angkutan
	1.2	Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota			
	1.3	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota			
	1.4	Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C			Kepala UPT Terminal & Parkir
	1.5	Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir			
	1.6	Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			Kepala UPT PKB
PENDUKUNG	2.1	Kegiatan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kepala Dinas	Sekretaris	Kepala UPT Pelabuhan
	2.2	Kegiatan Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau			
	3.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Kasubag Perencanaan & Keuangan
	3.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
	3.3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			Kasubag Umum & Kepegawaian
	3.4	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan			
3.5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah				
	3.6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah			

DINAS PERHUBUNGAN	1.1 Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota						
KEPALA DINAS SEKRETARIS		Persetujuan	Ya				
		Tidak					
KABID LALU LINTAS & ANGKUTAN	Melakukan perencanaan kegiatan dan pengajuan proposal		Melakukan koordinasi dan persiapan	Melakukan Pelaksanaan	Melakukan evaluasi kegiatan dan pembuatan laporan kegiatan	Menginventarisasi Kegiatan	
DINAS PERHUBUNGAN	1.2 Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota						
KEPALA DINAS SEKRETARIS		Persetujuan	Ya				
		Tidak					
KABID LALU LINTAS & ANGKUTAN	Melakukan perencanaan kegiatan dan pengajuan proposal		Melakukan koordinasi dan persiapan	Melakukan Pelaksanaan	Melakukan evaluasi kegiatan dan pembuatan laporan kegiatan	Menginventarisasi Kegiatan	
DINAS PERHUBUNGAN	1.3 Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota						
KEPALA DINAS SEKRETARIS		Persetujuan	Ya				
		Tidak					
KABID LALU LINTAS & ANGKUTAN	Melakukan perencanaan kegiatan dan pengajuan proposal		Melakukan koordinasi dan persiapan	Melakukan Pelaksanaan	Melakukan evaluasi kegiatan dan pembuatan laporan kegiatan	Menginventarisasi Kegiatan	
DINAS PERHUBUNGAN	1.4 Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C						
KEPALA DINAS SEKRETARIS		Persetujuan	Ya				
		Tidak					
KABID LALU LINTAS & ANGKUTAN	Melakukan perencanaan kegiatan dan pengajuan proposal		Melakukan koordinasi dan persiapan	Melakukan Pelaksanaan	Melakukan evaluasi kegiatan dan pembuatan laporan kegiatan	Menginventarisasi Kegiatan	
DINAS PERHUBUNGAN	1.5 Kegiatan Penertiban Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir						
KEPALA DINAS SEKRETARIS		Persetujuan	Ya				
		Tidak					
KABID LALU LINTAS & ANGKUTAN	Melakukan perencanaan kegiatan dan pengajuan proposal		Melakukan koordinasi dan persiapan	Melakukan Pelaksanaan	Melakukan evaluasi kegiatan dan pembuatan laporan kegiatan	Menginventarisasi Kegiatan	
DINAS PERHUBUNGAN	1.6 Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor						
KEPALA DINAS SEKRETARIS		Persetujuan	Ya				
		Tidak					
KABID LALU LINTAS & ANGKUTAN	Melakukan perencanaan kegiatan dan pengajuan proposal		Melakukan koordinasi dan persiapan	Melakukan Pelaksanaan	Melakukan evaluasi kegiatan dan pembuatan laporan kegiatan	Menginventarisasi Kegiatan	
DINAS PERHUBUNGAN	2.1 Kegiatan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota						
KEPALA DINAS SEKRETARIS		Persetujuan	Ya				
		Tidak					
KABID LALU LINTAS & ANGKUTAN	Melakukan perencanaan kegiatan dan pengajuan proposal		Melakukan koordinasi dan persiapan	Melakukan Pelaksanaan	Melakukan evaluasi kegiatan dan pembuatan laporan kegiatan	Menginventarisasi Kegiatan	
DINAS PERHUBUNGAN	2.2 Kegiatan Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau						
KEPALA DINAS SEKRETARIS		Persetujuan	Ya				
		Tidak					
KABID LALU LINTAS & ANGKUTAN	Melakukan perencanaan kegiatan dan pengajuan proposal		Melakukan koordinasi dan persiapan	Melakukan Pelaksanaan	Melakukan evaluasi kegiatan dan pembuatan laporan kegiatan	Menginventarisasi Kegiatan	



DINAS PERHUBUNGAN		3.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
KEPALA DINAS								
SEKRETARIS							Revisi	Tidak
							Ya	
	Melakukan perencanaan kegiatan	→	Melakukan koordinasi dan persiapan	→	Mengadakan kegiatan	→	Melakukan evaluasi laporan	
KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN							Melakukan revisi laporan	
								Dokumentasi Hasil

DINAS PERHUBUNGAN		3.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
KEPALA DINAS								
SEKRETARIS							Revisi	Tidak
							Ya	
	Melakukan perencanaan kegiatan	→	Melakukan koordinasi dan persiapan	→	Mengadakan kegiatan	→	Melakukan evaluasi laporan	
KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN							Melakukan revisi laporan	
								Dokumentasi Hasil

DINAS PERHUBUNGAN		3.3 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah						
KEPALA DINAS							Persetujuan	Ya
SEKRETARIS							Tidak	
	Melakukan perencanaan kegiatan pengadaan							Melakukan pengadaan barang
KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN								

DINAS PERHUBUNGAN		3.4 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
KEPALA DINAS							Persetujuan	Ya
SEKRETARIS							Tidak	
	Melakukan perencanaan kegiatan pengadaan							Melakukan pengadaan barang
KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN								

DINAS PERHUBUNGAN		3.5 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah						
KEPALA DINAS							Persetujuan	Ya
SEKRETARIS							Tidak	
	Melakukan perencanaan kegiatan pengadaan							Melakukan pengadaan barang
KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN								

DINAS PERHUBUNGAN		3.6 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
KEPALA DINAS							Persetujuan	Ya
SEKRETARIS							Tidak	
	Melakukan perencanaan kegiatan pengadaan							Melakukan pengadaan barang
KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN								



b) Tugas Fungsi

Berikut diuraikan Tupoksi dari masing-masing :

a. Dinas Perhubungan mempunyai tugas :

Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang perhubungan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Fungsi Dinas Perhubungan :

- Perumusan kebijakan teknis bidang perhubungan;
- Pelaksanaan kebijakan teknis bidang perhubungan;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perhubungan;
- Pelaksana administrasi dinas;
- Pembinaan UPT Dinas; dan
- Pelaksana fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretariat mempunyai Tugas:

Mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan rencana dan program, pengelolaan keuangan dan aset, dan menyelenggarakan urusan umum dan administrasi kepegawaian. Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan kesekretariatan, mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan perencanaan, program dan anggaran, administrasi umum dan kepegawaian, serta ketatausahaan.

Fungsi Sekretariat :

- Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas Perhubungan;
- Pemberian pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain di lingkungan Dinas Perhubungan;
- Pengkoordinasian penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja Dinas Perhubungan;
- Penyiapan Peraturan Perundang-undangan dibidang perhubungan sesuai dengan norma, standardan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- Penyelenggaraan urusan tata usaha, rumah tangga/ perlengkapan;
- Pelaksanaan urusan kepegawaian, pengelolaan keuangan serta penataan barang;



- Penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan;
- Pengkoordinasian pelaksanaan, pengumpulan dan penyusunan data, penilaian, pemantauan evaluasi dan analisa data hasil pelaksanaan tugas, penyiapan dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja dan penyusunan statistik dan dokumentasi dilingkungan Dinas Perhubungan;
- Pengkoordinasian urusan kedinasan yang menyangkut tata persuratan dinas, pendataan dan pengumpulan bahan pelaporan kedinasan;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Dinas Perhubungan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas Perhubungan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas :

Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas.

2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

Mengelola surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta administrasi kepegawaian. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan umum dan kepegawaian

c. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan mempunyai tugas :

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan.

Fungsi Bidang Lalu Lintas dan Angkutan :

- penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan;
- penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan;
- penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan dan
- pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas Perhubungan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan



- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1) Seksi Lalu Lintas, mempunyai tugas :

Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan lalu lintas.

2) Seksi Angkutan, mempunyai tugas :

Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan angkutan.

d. Bidang Prasarana dan Keselamatan, mempunyai tugas :

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang Prasarana dan Keselamatan.

Fungsi Bidang Prasarana dan Keselamatan :

- penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang prasarana dan keselamatan;
- penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang prasarana dan keselamatan;
- penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang prasarana dan keselamatan;
- pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas Perhubungan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1) Seksi Prasarana, mempunyai tugas :

Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan prasarana perhubungan.

2) Seksi Keselamatan dan Pengembangan, mempunyai tugas :

Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan bidang keselamatan dan pengembangan perhubungan.

e. UPT Dinas

- 1) Kegiatan teknis operasional UPT Dinas adalah melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
- 2) Kegiatan teknis penunjang UPT Dinas adalah melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas dinas.
- 3) Kepala UPT Dinas bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas dan wajib menyampaikan laporan kegiatan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan informasi dan evaluasi.

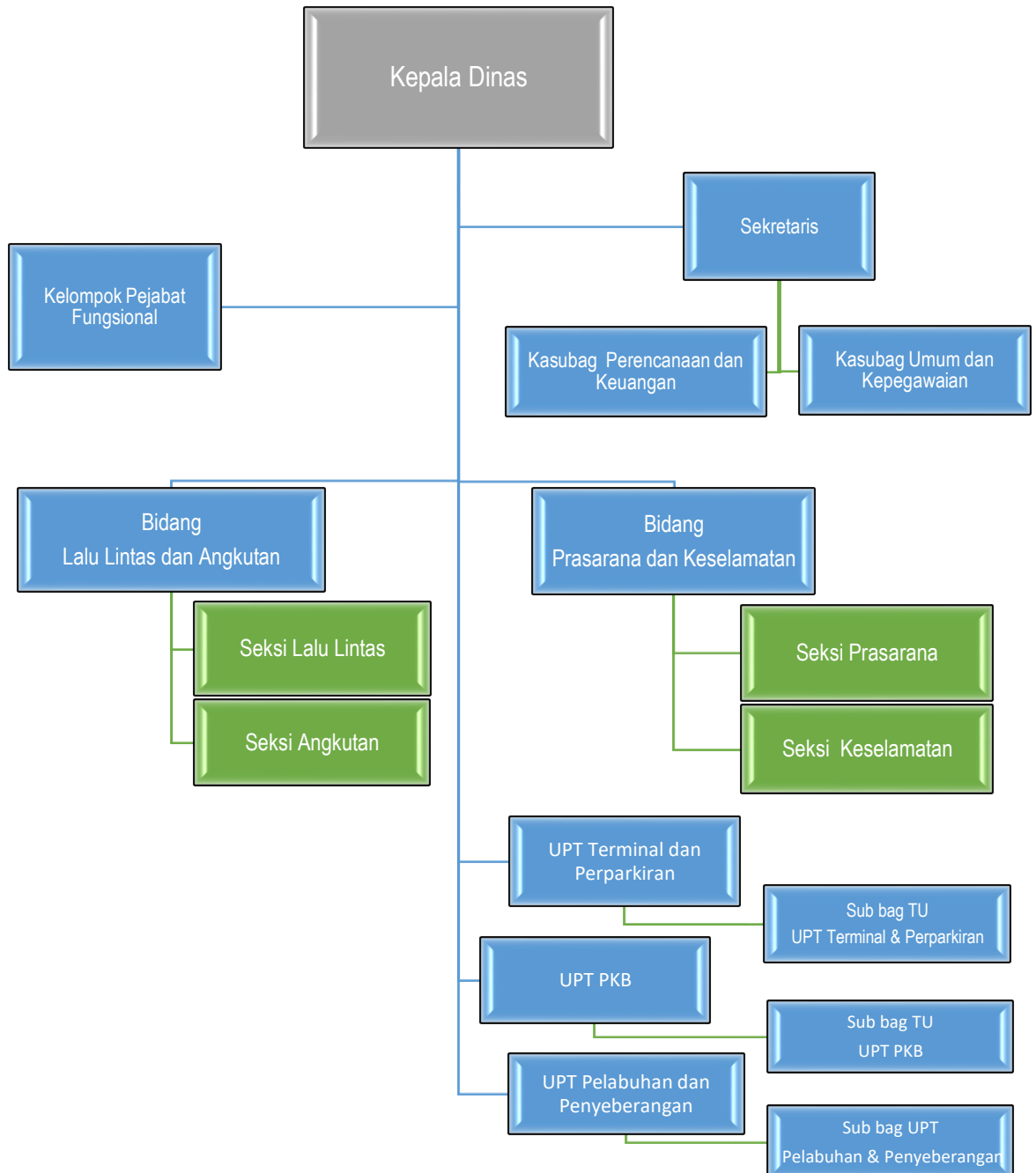
Pengaturan tentang UPT Dinas mengenai nomen klatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi ditetapkan dengan Peraturan Bupati 96 Tahun 2017 tentang pembentukan, organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut.

f. Kelompok Jabatan Fungsional

- 1) Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 4) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- 5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan 9 tahun beban kerja.
- 6) jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 7) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

c) Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor : 114 tahun 2021, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut dapat dilihat seperti gambar di bawah ini :



Gambar 1.1 : Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut

Dinas Perhubungan terdiri dari :

- a. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - 2) Sub Bagian Umum Kepegawaian.
- b. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan terdiri dari :
 - 1) Seksi Lalu Lintas;
 - 2) Seksi Angkutan;
- c. Bidang Prasarana dan Keselamatan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Prasarana;
 - 2) Seksi Keselamatan dan Pengembangan;
- d. UPT Dinas; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

F. Isu Strategis

Kabupaten Tanah Laut dengan ibukota Pelaihari memiliki wilayah seluas 3.361,35 km². Luas Kabupaten ini merupakan 9,71% dari luas Provinsi Kalimantan Selatan. Geografis Kabupaten Tanah Laut terletak diantara 114030'20" dan 115023'31" Bujur Timur, serta diantara 3030'33" dan 4011'38" Lintang Selatan. Kabupaten Tanah Laut memiliki batas administrasi sebagai berikut:

- Batas Utara adalah Kabupaten Banjar,
- Batas Timur adalah Kabupaten Tanah Bumbu,
- Batas Selatan adalah Laut Jawa,
- Batas Barat adalah Laut Jawa.

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, dapat dirumuskan beberapa isu strategis yang dianggap penting dan berpengaruh serta merupakan tugas dan tanggung jawab SKPD Dinas Perhubungan.

Isu – isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan sebagai berikut :

1. Minimnya kesadaran dan peran serta masyarakat akan keselamatan dan keamanan transportasi sehingga diperlukannya pengawasan dan pengendalian disiplin tata tertib berlalu lintas tidak optimal.
2. Status Pelabuhan Laut Swarangan Pelaihari belum yang ada di Kawasan industri jorong masih “pengumpan lokal”.

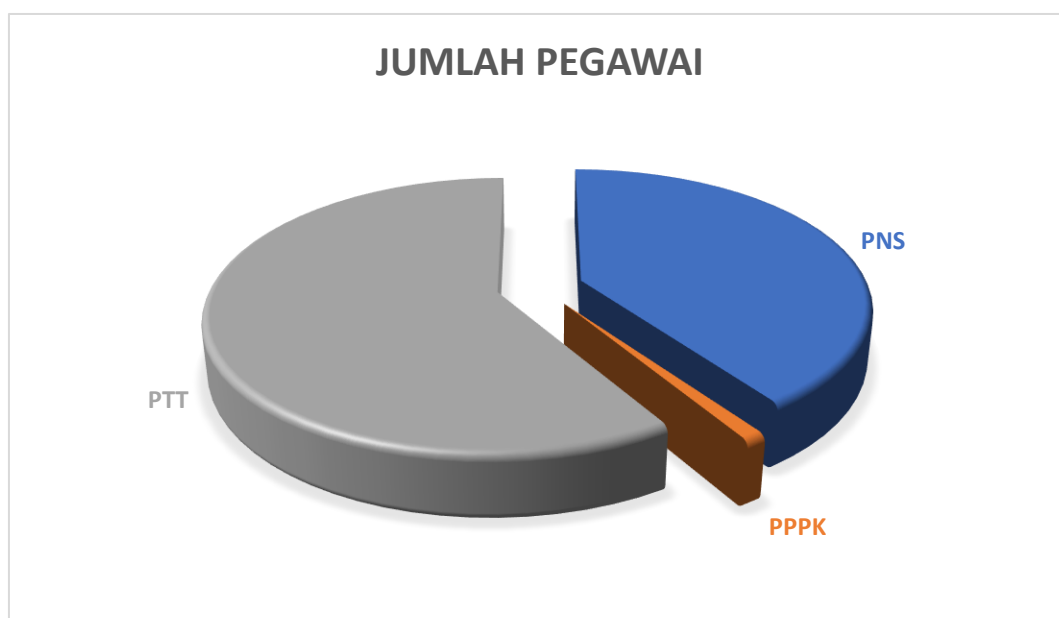
3. Pembangunan terminal tipe C lahan masih pinjam pakai milik Polres Tanah Laut sehingga pelayanan terminal untuk melayani jaringan moda transportasi belum optimal.

G. Dukungan SDM, Sarana Prasarana dan Anggaran

Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut tahun 2024 didukung dengan 97 orang pegawai terdiri dari : PNS 39 orang, PPPK 1 orang, dan 57 PTT. Dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.1 : Data PNS dan PTT Dishub Tahun 2024

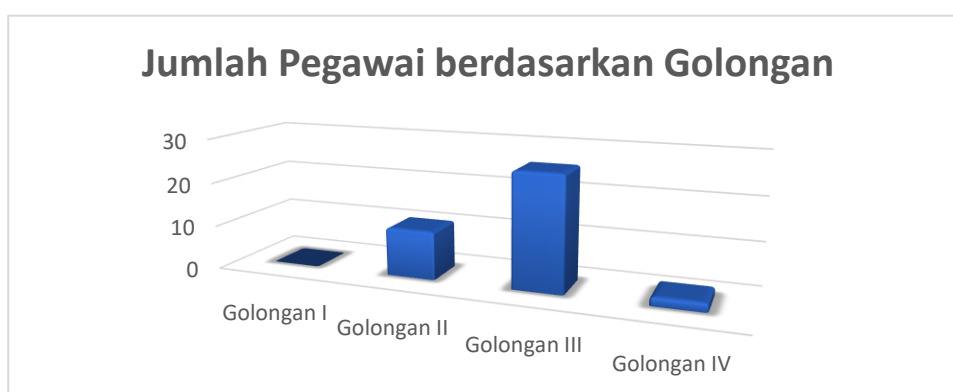
No.	Uraian	Jumlah Pegawai
1.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	39 orang
2.	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	1 orang
3.	Pegawai Tidak Tetap (PTT)	57 orang
Jumlah		97 orang



Gambar 1.2 : Grafik Jumlah pegawai

Tabel 1.2 : Jumlah PNS menurut tingkat golongan

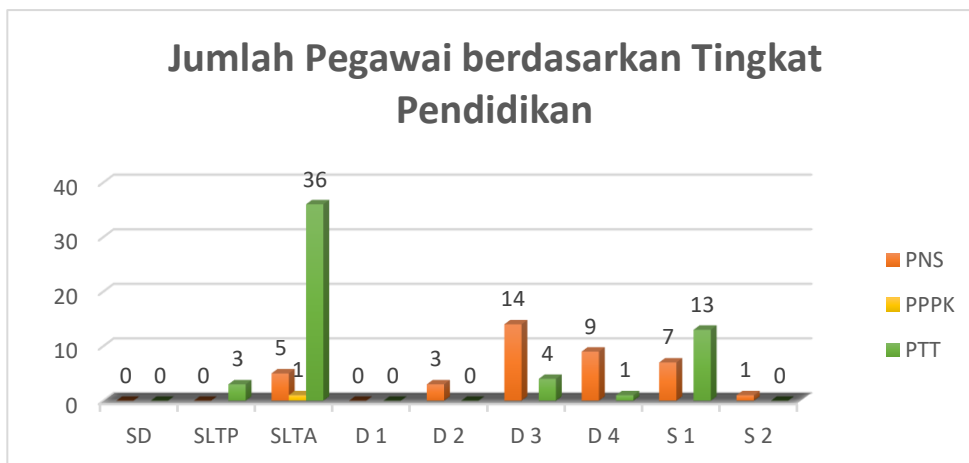
No.	Golongan	Jumlah Pegawai
1.	Golongan I	-
2.	Golongan II	11 orang
3.	Golongan III	26 orang
4.	Golongan IV	2 orang
	Jumlah	39 orang



Gambar 1.3 : Grafik Jumlah pegawai berdasarkan tingkat golongan

Tabel 1.3 : Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

No.	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	PNS	PPPK	PTT
1.	SD	-	-	-
2.	SLTP	-	-	3
3.	SLTA	5	1	36
4.	D 1	-	-	-
5.	D 2	3	-	-
6.	D 3	14	-	4
7.	D.4	9	-	1
8.	S.1	7	-	13
9.	S.2	1	-	-
	Jumlah	39	1	57



Gambar 1.4 :

Grafik Jumlah pegawai berdasarkan tingkat kualifikasi pendidikan

Tabel 1.4 : Jumlah PNS menurut tingkat jabatan

No.	Tingkat Jabatan	Jumlah Pegawai
1.	Eselon II	1
2.	Eselon III	2
3.	Eselon IV	11
4.	Fungsional Umum	20
5.	Fungsional Tertentu	5
	Jumlah	39 orang



Gambar 1.5 :

Grafik Jumlah pegawai berdasarkan tingkat Jabatan

Tabel 1.5 : Kondisi Sarana dan Prasarana Perhubungan Tahun 2024

No.	Jenis Barang>Nama Barang	Jumlah	Satuan	Keadaan Barang		
				Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
1	Kendaraan Roda 4/2	42	Unit	√		
2	Speed boat	2	Unit	√		
3	Gedung kantor	6	Unit	√		
4	Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor	1	Unit	√		
5	Terminal	1	Unit	√		
6	Dermaga	-	Unit	√		
7	Pos UPT Pelabuhan	4	Unit	√		
8	Pos Pengawasan bid. Laut	1	Unit	√		
9	Pos Pengawasan LLAJ	2	Unit	√		
10	Radio Repeater	1	Unit	√		
11	Komputer/Laptop	60	Unit	√		
12	Rambu darat Standart	1843	Unit	√		
13	Rambu Sungai	60	Unit	√		
14	Rambu Elektronik	2	Unit	√		
15	RPPJ	48	Unit	√		
16	Cermin cembung	40	Unit	√		
17	Delinator	133	Unit	√		
18	Warning light	12	Unit	√		
19	APILL	6	Unit	√		
20	Guardril	93	Unit	√		
21	Halte	14	Unit	√		
22	Pagar Besi Barrier	20	Unit	√		
23	Road Barrier	78	Unit	√		
24	Traffic Cone	91	Unit	√		
25	Zoss	2	Lokasi	√		
26	Marka	1	Lokasi	√		
27	Pellican Crossing	1	Unit	√		
28	APJ 60 Watt	104	Unit	√		

No.	Jenis Barang>Nama Barang	Jumlah	Satuan	Keadaan Barang		
				Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
29	APJ 40 Watt	100	Unit	√		
30	APJ 90 Watt	50	Unit	√		
31	APJ 120 Wat	45	Unit	√		
32	APJ 30 Watt	75	Unit	√		
33	APJ 40 Watt	364	Unit	√		
34	APJ 60 Watt	465	Unit	√		
35	APJ 90 Watt	130	Unit	√		
36	APJ Smart System	38	Unit	√		
37	APJ Konvensional (POKIR)	1263	Unit	√		
38	Tiang 7M	100	Unit	√		
39	Lampu Sorot	10	Unit	√		
	Jumlah	5.308	Unit			

Tabel 1.6 : Total Anggaran Dinas Perhubungan Tahun 2024

No.	Dinas dan UPT	Pagu Anggaran		Bertamba / Berkurang
		Murni (Rp.)	Perubahan (Rp.)	
1	Dinas Perhubungan	35.547.461.949	50.069.977.317	14.522.515.368
2	UPT Pengujian Kendaraan Bermotor	469.962.378	649.277.378	179.315.000
3	UPT Terminal dan Perparkiran	291.775.708	390.664.515	98.888.807
4	UPT Pelabuhan dan Penyeberangan	198.394.269	198.394.269	-
	Jumlah	36.507.594.304	51.308.313.479	14.800.719.175

H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun Sebelumnya

Berdasarkan Surat Inspektur Kabupaten Tanah Laut Nomor : 7001.2.8/88-LHE AKIP/Insp/2024 tanggal 1 April 2024 perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) SKPD 2024 bahwa ada 2 (dua) yang direkomendasikan untuk ditindaklanjuti, yaitu :

Tabel 1.7 Matrik Tindak Lanjut Evaluasi SAKIP

No.	Rekomendasi	Rencana Aksi	Status / Progres Penyelesaian	Keterangan
1	Dokumen perencanaan kinerja agar dipublikasikan pada Website resmi Dinas Perhubungan atau pada Website PPID Kabupaten Tanah Laut	Mempublikasikan dokumen perencanaan kinerja pada Website PPID Kabupaten Tanah Laut	Sudah dilaksanakan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ RENSTRA 2024-2026; ▪ Renja 2024; ▪ LKj 2023 <p>Telah di Upload di website PPID Kab. Tanah Laut pada tanggal : 21 Pebruari 2024</p>
2	Agar menyajikan informasi tentang crosscutting kinerja antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (pada dokumen pohon kinerja)	Melakukan perbaikan pada dokumen pohon kinerja yang ada menggambarkan CrossCutting kinerja antar bidang / dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan dengan stakeholder eksternal lainnya.	Sudah dilaksanakan	Pohon kinerja terlampir

I. Sistematika Penyajian

Dalam pembuatan laporan akuntabilitas Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut untuk tahun 2024 ini tim penyusun membagi dalam beberapa pokok bahasan sebagai berikut, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Dasar Hukum
- D. Cascading Kinerja
- E. Proses Bisnis, Tugas Fungsi, dan Struktur Organisasi

- F. Isu Strategis Perangkat Daerah
- G. Dukungan SDM, Sarana Prasarana dan Anggaran
- H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun Sebelumnya
- I. Sistematika Penyajian

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- A. Tujuan, Sasaran Kabupaten
- B. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah
- C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- D. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi
 - a. Pencapaian kinerja sasaran strategis perangkat daerah (IKU Eselon II)
 - b. Analisa capaian kinerja tahun 2024 dan perbandingan kinerja tahun 2024 dengan realisasi
 - c. Analisa keberhasilan/kegagalan, hambatan dan langkah-langkah antisipasi yang diambil
- B. Akuntabilitas Keuangan
 - 1. Anggaran dan realisasi APBD 2024
 - 2. Anggaran dan realisasi menurut sasaran dan program
 - 3. Perbandingan program dan kegiatan tahun 2024 dan 2023

BAB IV PENUTUP.

- A. Simpulan
- B. Strategi Peningkatan Kinerja

Lampiran :

1. IKU
2. Pohon Kinerja
3. Perjanjian Kinerja
4. Capaian Kinerja Per Triwulan I s.d IV
5. Monev Renstra
6. Matrik keselarasan

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Tujuan, Sasaran Kabupaten

Dengan memperhatikan berbagai tantangan pembangunan nasional dan capaian pembangunan selama ini dan rencana pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam RPD 2024-2026 , memuat konsep **TANAH LAUT BERDAYA SAING** dengan fokus pada :

- Pengembangan ekonomi dan sumber daya manusia dengan pelayanan dasar dan infrastruktur yang berkualitas;
- Peningkatan ekonomi dan sumber daya manusia yang berdaya saing;
- Pemantapan perekonomian daerah melalui pembangunan yang berkelanjutan.

Berdasarkan konsep RPD tersebut masing-masing dimensi kemudian dielaborasi menjadi 3 tujuan dengan 20 sasaran turunannya.



Gambar 2.1 : Tujuan dan Sasaran RPD Tahun 2024-2026

B. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam RPD Kabupaten Tanah Laut ini merupakan gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai Kabupaten Tanah Laut. Perumusan tujuan dan sasaran RPD tersebut menjadi pemandu arah bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut dalam menyusun tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, rencana program dan kegiatan serta pendanaannya. Dengan adanya panduan tersebut, maka penyelenggaraan pelayanan Kabupaten Tanah Laut dapat mengimplementasikan aspirasi masyarakat serta mendukung dan mengintegrasikan semua kegiatan pelayanan publik di kabupaten ini.

Dalam rangka mewujudkan arah pembangunan RPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026 sekaligus menerjemahkan dan mengacu pada tujuan ketiga RPD Kabupaten Tanah Laut yaitu (1) Peningkatan Ekonomi Masyarakat Secara Merata dengan Pembangunan Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan, dan (2) Meningkatkan Tatakelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*), maka ditetapkan tujuan RENSTRA Dinas Perhubungan Tahun 2024-2026 adalah **Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas, dan Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah**. Adapun gambaran tujuan ke dalam sasaran yang lebih spesifik sekaligus penyelarannya dengan tujuan dan sasaran RPD dapat dilihat pada gambar berikut ini :



Gambar 2.2 : Hubungan Tujuan dan Sasaran RPD dengan RENSTRA Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut tahun 2024-2026.

Gambar di atas memperlihatkan bahwa tujuan (akhir) yang ingin dicapai dari penyelenggaraan layanan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut sebagai wujud nyata pelaksanaan amanat tugas dan fungsi bidang urusan perhubungan, yaitu Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas, dan Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah untuk kemudian dijabarkan ke dalam sasaran yang ingin diraih antara lain:

- Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Perhubungan yang Berkualitas;
- Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja internal Dinas Perhubungan.

Adapun tujuan dan sasaran pelayanan Dinas Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026 beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel sebagaimana berikut :

Tabel 2.1 :

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut
Tahun 2024-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran PD	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Pada Tahun Ke-		
				2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas		▪ Indeks Infrastruktur Perhubungan	31,79	26,90	33,49	40,35
			▪ Ratio konektivitas angkutan	0,56	0,53	0,71	0,79
		1. Meningkatnya Keselamatan dan Kelancaran Lalu Lintas	▪ Volume Capacity ratio	0,26	< 0,4	< 0,4	< 0,4
			▪ Angka kecelakaan	0	0.00001	0.00001	0.00001
		2. Meningkatnya Pelayanan Angkutan Umum	prosentase daerah yang terlayani transportasi umum	55%	55%	64%	75%
2	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja internal Pemerintah Daerah		Nilai SAKIP Kabupaten	67	70,01	72	75
		Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja internal Dinas Perhubungan	Nilai SAKIP Dinas Perhubungan	71,80	75	78	80,01

Tabel 2.2 : Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan Rumus	Penanggung Jawab / Sumber Data
1.	Meningkatnya Keselamatan dan Kelancaran Lalu Lintas	▪ Volume Capacity Ratio	$V/C \text{ Ratio} = \text{Jumlah kendaraan} / \text{Kapasitas jalan}$	Dinas Perhubungan
		▪ Angka Kecelakaan	Rasio kejadian kecelakaan per 100.000	Dinas Perhubungan
2.	Meningkatnya Pelayanan Angkutan	Persentase daerah yang terlayani transportasi umum	$\frac{\text{Jumlah trayek yang terlayani pada Kabupaten}}{\text{Jumlah kebutuhan trayek pada kabupaten}} \times 100$	Dinas Perhubungan
3.	Meningkatnya kinerja akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan	Nilai AKIP Dinas Perhubungan	Perencanaan Kinerja (30%) + Pengukuran Kinerja (25%) + Pelaporan Kinerja (15%) + Evaluasi Internal (10%) + Pencapaian Kinerja (20%)	Dinas Perhubungan

Target Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.3 : Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2024	
			Satuan	Target
1	Meningkatnya Keselamatan dan Kelancaran Lalu Lintas	▪ Volume Capacity Ratio	Rasio	0.4
		▪ Angka Kecelakaan	Rasio	0.00001
	serta Meningkatkan Pelayanan Angkutan	Persentase daerah yang terlayani transportasi umum	%	55
	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja internal Dinas Perhubungan	Nilai SAKIP Dinas Perhubungan	Nilai	75

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja atau dengan nama lain dikenal dengan Penetapan Kinerja merupakan dokumen yang berisi komitmen pimpinan untuk melaksanakan program dan kegiatan yang ditetapkan guna mencapai target-target dari setiap sasaran yang dijanjikan. Perjanjian Kinerja atau Penetapan Kinerja dibuat setelah disahkannya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Hal ini berarti bahwa komitmen yang dibuat merupakan janji pimpinan instansi untuk mempergunakan anggaran yang diberikan guna semaksimal mungkin melalui implementasi kegiatan-kegiatan yang direncanakan berupaya mencapai target-target yang ditetapkan.

Dalam Penetapan Kinerja Tahun 2024, Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut berkomitmen untuk merealisasikan sasaran strategis melalui berbagai program dan kegiatan yang direncanakan. Lebih detail, Perjanjian/Penetapan Kinerja tersebut tampak seperti tabel berikut ini :

1. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut

Tabel 2.4 : Perjanjian/penetapan Kinerja Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya Keselamatan dan Kelancaran Lalu Lintas	▪ Volume Capacity Ratio	Rasio	0.4
		▪ Angka Kecelakaan	Rasio	0.00001
2	Meningkatnya Pelayanan Angkutan	Persentase daerah yang terlayani transportasi umum	%	55
3	Meningkatnya kinerja akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan	Nilai AKIP Dinas Perhubungan	Nilai	75

2. Perjanjian Kinerja Eselon III

Tabel 2.5 : Perjanjian Kinerja Eselon III

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya kualitas prasarana perhubungan	prosentase prasarana transportasi perhubungan dalam kondisi baik	100%	Kabid Prasarana dan Keselamatan
2	Meningkatnya kapasitas lalu lintas jalan	Prosentase jalan tertib lalu lintas	18%	Kabid Lalu Lintas dan Angkutan
3	Meningkatnya perluasan jaringan transportasi	Jumlah trayek transportasi yang aktif	6 Trayek	
4	Meningkatnya kualitas kendaraan bermotor	prosentase kendaraan bermotor yang laik jalan	100%	Ka UPT Pengujian Kendaraan Bermotor
5	Meningkatnya kualitas perencanaan	▪ Nilai komponen perencanaan	22 Nilai	Sekretaris Dinas
		▪ Nilai komponen pengukuran	21 Nilai	
		▪ Nilai komponen pelaporan	12 Nilai	
		▪ Nilai komponen evaluasi internal	20 Nilai	
		▪ Hasil survei pelayanan kesekretariatan	82 Nilai	

3. Perjanjian Kinerja Eselon IV

Tabel 2.6 : Perjanjian Kinerja Eselon IV Tahun 2024.

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Penanggung Jawab
1	Terpenuhinya prasarana penunjang jalan yang berkualitas	prosentasi panjang jalan yang memiliki prasarana penunjang yang sesuai standart	25%	Kasi Prasarana
1.1	Terlaksananya pengadaan alat perlengkapan jalan sesuai standar	Jumlah alat perlengkapan jalan yang sesuai standar	1.599 buah	
1.2	Terlaksananya pemeliharaan alat perlengkapan jalan sesuai standar	Jumlah alat perlengkapan jalan yang dipelihara	31 buah	
2	Terlaksananya pembangunan / rehabilitasi halte	Jumlah halte yang terbangun/rehab	1 unit	
3	Tertatanya lalu lintas jaringan jalan	prosentase jaringan jalan yang memiliki lalu lintas tertata	9,71%	Kasi Keselamatan dan Pengembangan
3.1	Terlaksananya pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan kabupaten	Jumlah uji petik kendaraan bermotor yang dilaksanakan	12 kegiatan	
3.2	Terlaksananya audit keselamatan jalan	Jumlah rekomendasi hasil audit keselamatan jalan	4 buah	
4	Terpenuhinya prasarana penunjang jalan yang berkualitas	prosentase panjang jalan yang memiliki prasarana penunjang yang sesuai standart	25%	Kepala Seksi Lalu Lintas
4.1	Terlaksananya perencanaan kebutuhan Alat Perlengkapan Jalan	Jumlah dokumen rencana kebutuhan perlengkapan jalan	3 Dokumen	
5.	Tertatanya lalu lintas jaringan jalan	prosentase jaringan jalan yang memiliki lalu lintas tertata	9,71%	
5.1	Terlaksananya survey Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah rekomendasi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	12Dokumen	
5.2	Terlaksananya audit keselamatan jalan	Jumlah rekomendasi hasil audit keselamatan jalan	6 buah	

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Penanggung Jawab
6	Meningkatnya Kapasitas Penilai Andalalin	Jumlah penilai Andalalin yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi	2 orang	
7.	Terlayannya angkutan masyarakat pengguna jasa transportasi dan pelajar	jumlah penumpang angkutan jasa transportasi dan pelajar	40.000 orang	Kepala Seksi Angkutan
7.1	Tersedianya angkutan umum dan pelajar	Jumlah angkutan yang beroperasi	6 unit	
7.2	Terlaksananya sosialisasi keselamatan angkutan	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	1 kegiatan	
8.	Terlayannya angkutan masyarakat pengguna jasa transportasi dan pelajar	jumlah penumpang angkutan jasa transportasi sungai	15.000 orang	Kepala UPT Pelabuhan dan Penyeberangan
8.1	Pengawasan terhadap penumpang kapal wisata religi	jumlah penumpang termonitor	15.000 orang	
9	Terpenuhinya terminal dan dermaga penyeberangan sesuai standar	jumlah dermaga penyeberangan sesuai standar	1 dermaga	
9.1	Terlaksananya Pembangunan/ rehabilitasi dermaga penyeberangan dan sungai	Jumlah dermaga terbangun/terpelihara	1 dermaga	
10	Terpenuhinya terminal dan dermaga penyeberangan sesuai standar	jumlah terminal perhubungan sesuai standar	1 unit	Kepala UPT Terminal dan Perparkiran
10.1	Terlaksananya Rehabilitasi/ pembangunan fasilitas utama/ pendukung terminal	Jumlah fasilitas utama /pendukung terminal yang direhab / di bangun	1 unit	
11	Menurunnya parkir liar	Jumlah titik parkir liar	3 lokasi	
11.1	Terlaksananya patroli parkir	Jumlah lokasi parkir termonitor	29 lokasi	
11.2	Tersedianya juru parkir/pengelola parkir	Jumlah lokasi parkir yang memiliki juru parkir/pengelola parkir	29 orang	
11.3	Telaksananya Pembinaan terhadap juru parkir/pengelola parkir liar	Jumlah pembinaan juru parkir/pengelola parkir liar	3 orang	

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Penanggung Jawab
12	Meningkatnya kualitas prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor	prosentase prasarana pengujian dalam kondisi baik	100%	Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor
12.1	terlaksananya pemeliharaan peralatan pengujian kendaraan bermotor	Jumlah peralatan uji yang terpelihara	12 unit	
12.2	terlaksananya kaliberasi/standarisasi peralatan pengujian kendaraan bermotor	Jumlah peralatan uji yang telah dikaliberasi	12 unit	
12.3	Terlaksananya pembangunan gedung pengujian kendaraan bermotor yang representatif	Jumlah gedung pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar	1 unit	
13	meningkatnya standar uji kelayakan bermotor	prosentase kendaraan bermotor yang lulus uji kelayakan	100%	
13.1	Terlaksananya pelayanan pengujian kendaran bermotor	Jumlah kendaraan bermotor wajib uji yang dilakukan uji teknis	2.000 unit	
13.2	Terlaksananya penerbitan bukti lulus uji elektronik sesuai standar kementerian perhubungan	Jumlah bukti lulus uji elektronik (BLUe) yang diterbitkan	1.800 unit	
14	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
14.1	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	
14.2	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	
15	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat	100%	
15.1	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang / Bulan	
15.2	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5 Dokumen	

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Penanggung Jawab
16	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	Kasubag Umum dan Kepegawaian
16.1	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 paket	
16.2	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 paket	
16.3	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	
16.4	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	
16.5	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 paket	
16.6	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	190 Laporan	
17	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	
17.1	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 unit	
18	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	
18.1	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Penanggung Jawab
18.2	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	
19	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	
19.1	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	
19.2	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	
19.3	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	
19.4	Terlaksananya pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	
20	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	
20.1	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	Kasubag TU UPT Pengujian Kendaraan Bermotor
20.2	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	
21	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	Kasubag TU UPT Terminal dan Perparkiran
21.1	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Penanggung Jawab
21.2	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	
22	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	Kasubag TU UPT Pelabuhan dan Penyeberangan
22.1	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	
22.2	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	

D. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

Dalam mendukung sasaran dan tujuan Kabupaten Tanah Laut, sebagaimana yang dijabarkan dalam Sasaran Strategis maka untuk mencapai sasaran tersebut memerlukan dukungan anggaran yang dirincikan dalam Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.27 : Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2024

No.	Program/Kegiatan/ dan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran		Realisasi	%	PENANGGUNG JAWAB /PPTK
		Murni (Rp.)	Perubahan (Rp.)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5/4)*100	(7)
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					
A	SEKRETARIAT :					
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					

No.	Program/Kegiatan/ dan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran		Realisasi	%	PENANGGUNG JAWAB /PPTK
		Murni (Rp.)	Perubahan (Rp.)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5/4)*100	(7)
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.809.866	4.809.866	4.220.000	87,74%	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.451.358	2.451.358	2.080.000	84,85%	
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.358.508	2.358.508	2.140.000	90,74%	
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.693.113.711	6.163.162.511	5.750.610.276	93,31%	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.692.613.711	6.162.662.511	5.750.610.276	93,31%	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	500.000	500.000	-	0,00%	
3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	918.137.833	1.137.482.439	1.060.953.050	93,27%	Kasubag Umum dan Kepegawaian
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.999.780	7.999.780	6.647.500	83,10%	
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	421.608.569	500.953.175	442.419.550	88,32%	
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.999.484	9.999.484	9.900.000	99,01%	
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	2.400.000	2.400.000	1.920.000	80,00%	
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	15.000.000	15.000.000	15.000.000	100,00%	
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	461.130.000	601.130.000	585.066.000	97,33%	
4	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.215.663.880	3.055.378.880	2.839.750.000	92,94%	Kasubag Umum dan Kepegawaian
	Sub kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.215.663.880	3.055.378.880	2.839.750.000	92,94%	

No.	Program/Kegiatan/ dan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran		Realisasi	%	PENANGGUNG JAWAB /PPTK
		Murni (Rp.)	Perubahan (Rp.)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5/4)*100	(7)
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.444.879.312	2.426.250.848	2.067.956.878	85,23%	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	151.500.000	157.500.000	111.153.070	70,57%	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.293.379.312	2.268.750.848	1.956.803.808	86,25%	
6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	831.784.680	831.784.680	754.648.677	90,73%	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	31.000.000	31.000.000	30.781.100	99,29%	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional / Lapangan	259.000.000	259.000.000	247.643.087	95,62%	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.900.000	19.900.000	19.774.000	99,37%	
	Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	521.884.680	521.884.680	456.450.490	87,46%	
JUMLAH		12.108.389.282	13.618.869.224	12.478.138.881	91,62%	
B	BIDANG-BIDANG :					
I	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					
1	Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	500.000.000	500.000.000	460.230.800	92,05%	Kasi Lalu Lintas
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	500.000.000	500.000.000	460.230.800	92,05%	
2	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	21.747.275.983	34.481.430.321	30.219.688.022	87,64%	Kasi Prasarana

No.	Program/Kegiatan/ dan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran		Realisasi	%	PENANGGUNG JAWAB /PPTK
		Murni (Rp.)	Perubahan (Rp.)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5/4)*100	(7)
	Sub Kegiatan Penyediaan perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	21.683.275.986	34.417.430.324	30.182.753.022	87,70%	
	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	63.999.997	63.999.997	36.935.000	57,71%	
3	Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	457.560.714	735.441.802	697.015.754	94,78%	
	Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kabupaten/ Kota	340.550.000	359.441.372	346.511.000	96,40%	Kasi Keselamatan
	Sub Kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	9.384.880	259.374.596	235.814.754	90,92%	
	Sub Kegiatan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	107.625.834	116.625.834	114.690.000	98,34%	Kasi Lalu Lintas
4	Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	83.290.970	83.290.970	44.580.000	53,52%	
	Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	24.930.970	24.930.970	24.925.000	99,98%	Kasi Lalu Lintas
	Sub kegiatan Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin	40.000.000	40.000.000	3.325.000	8,31%	
	Sub kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	18.360.000	18.360.000	16.330.000	88,94%	
5	Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	650.945.000	650.945.000	532.153.500	81,75%	Kasi Angkutan
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	650.945.000	650.945.000	532.153.500	81,75%	
JUMLAH		23.439.072.667	36.451.108.093	31.953.668.076	87,66%	

No.	Program/Kegiatan/ dan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran		Realisasi	%	PENANGGUNG JAWAB /PPTK
		Murni (Rp.)	Perubahan (Rp.)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5/4)*100	(7)
C	UPT. PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR					
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
1	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	24.962.528	24.962.528	17.361.270	69,55%	
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.995.670	14.995.670	8.509.400	56,75%	Kasubag TU UPT PKB
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.966.858	9.966.858	8.851.870	88,81%	
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					
1	Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	444.999.850	624.314.850	593.827.975	95,12%	
	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	149.999.850	149.999.850	141.270.000	94,18%	Kepala UPT PKB
	Sub kegiatan Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala	45.000.000	45.000.000	45.000.000	100,00%	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	250.000.000	429.315.000	407.557.975	94,93%	
	JUMLAH	469.962.378	649.277.378	611.189.245	94,13%	
D	UPT. TERMINAL DAN PERPARKIRAN					
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
1	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	77.996.958	176.885.765	163.537.500	92,45%	
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.984.950	113.873.757	100.537.500	88,29%	Kasubag TU UPT Terminal dan Perparkiran
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	63.012.008	63.012.008	63.000.000	99,98%	
II						

No.	Program/Kegiatan/ dan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran		Realisasi	%	PENANGGUNG JAWAB /PPTK
		Murni (Rp.)	Perubahan (Rp.)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5/4)*100	(7)
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					
1	Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	24.988.000	24.988.000	21.172.000	84,73%	Kepala UPT Terminal dan Perparkiran
	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	24.988.000	24.988.000	21.172.000	84,73%	
2	Kegiatan Penertiban Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	188.790.750	188.790.750	-	0,00%	
	Sub Kegiatan Koordinisasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan Kab/Kota	188.790.750	188.790.750	-	0,00%	
JUMLAH		291.775.708	390.664.515	184.709.500	47,28%	
E	UPT. PELABUHAN DAN PENYEBERANGAN					
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
1	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	18.518.269	18.518.269	18.155.000	98,04%	Kasubag TU UPT Pelabuhan dan penyeberangan
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.542.794	13.542.794	13.515.000	99,79%	
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.975.475	4.975.475	4.640.000	93,26%	
II	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN					

No.	Program/Kegiatan/ dan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran		Realisasi	%	PENANGGUNG JAWAB /PPTK
		Murni (Rp.)	Perubahan (Rp.)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5/4)*100	(7)
1	Kegiatan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	29.876.000	29.876.000	29.613.500	99,12%	Kepala UPT Pelabuhan dan Penyeberangan
	Sub kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	29.876.000	29.876.000	29.613.500	99,12%	
2	Kegiatan Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	150.000.000	150.000.000	147.156.838	98,10%	
	Sub kegiatan Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau	150.000.000	150.000.000	147.156.838	98,10%	
JUMLAH		198.394.269	198.394.269	194.925.338	98,25%	
TOTAL ANGGARAN KESELURUHAN		36.507.594.304	51.308.313.479	45.422.631.040	88,53%	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi

Akuntabilitas diartikan sebagai kemampuan untuk menjawab atas mandat yang diberikan kepada pengemban amanat, sedangkan kinerja diartikan sebagai prestasi kerja pengemban amanat atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan serta Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintahan, laporan ini mengungkapkan capaian kinerja sasaran dan hasil (outcome) yang dicapai oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut di Tahun 2024.

Laporan Kinerja tahun 2024 ini merupakan laporan kinerja tahun pertama RPD 2024-2026 dan menyajikan pengukuran capaian indikator kinerja sasaran, output, dan hasil sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Penetapan indikator kinerja dan targetnya merupakan prasyarat mutlak agar mekanisme suatu pengukuran kinerja dapat diterapkan sehingga capaian kinerja suatu instansi dapat diketahui tingkat keberhasilannya.

Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara rencana kinerja (performance plan) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang telah dicapai.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan metode perbandingan realisasi capaian kinerja sasaran terhadap rencana kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Kecuali untuk indikator tertentu yang menggunakan nilai indeks, secara umum ada 2 (dua) pendekatan yang digunakan dalam melakukan pengukuran kinerja, yaitu meliputi :

1. Perbandingan lurus.

Pendekatan ini digunakan untuk mengukur capaian kinerja yang mana peningkatan realisasi capaian mencerminkan peningkatan kinerja. Peningkatan angka melek huruf, panjang jalan, jumlah dokumen, angka kunjungan, dan

sejenisnya merupakan contoh kasus penggunaan pendekatan tersebut. Rumus yang digunakan adalah :

$$(Realisasi / Target) \times 100\%$$

2. Perbandingan terbalik

Pendekatan ini digunakan untuk mengukur capaian kinerja yang mana meningkatnya realisasi capaian justru mencerminkan menurunnya kinerja organisasi. Demikian pula berlaku sebaliknya, rendahnya realisasi bermakna semakin baiknya kinerja organisasi. Rumus yang digunakan adalah:

$$\frac{(2 \times Target) - Realisasi}{Target} \times 100\%$$

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan atau kekurangan pelaksanaan kegiatan, efektivitas penggunaan anggaran untuk mencapai target yang telah ditetapkan, serta seberapa tinggi tingkat efektivitas pemanfaatan sumber daya yang ada.

Dari sasaran strategis yang direncanakan dan ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja, telah diupayakan pencapaiannya melalui berbagai program dan kegiatan yang dilakukan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut sepanjang tahun 2024.

Tabel 3.1 : Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya Keselamatan dan Kelancaran Lalu Lintas	▪ Volume Capacity Ratio	Rasio	0.4
		▪ Angka Kecelakaan	Rasio	0.00001
2	serta Meningkatkan Pelayanan Angkutan	Persentase daerah yang terlayani transportasi umum	%	55
3	Meningkatnya kinerja akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan	Nilai AKIP Dinas Perhubungan	Nilai	75

a. Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis Perangkat Daerah (IKU Eselon II)

Tabel 3.2 : Pencapaian Indikator Kinerja Utama Terhadap RENSTRA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Tahun 2024			Target Akhir RENSTRA	Capaian Tahun 2024 terhadap Target Akhir RENSTRA (%)
				Target	Realisasi	% Capaian		
1	Meningkatnya Keselamatan dan Kelancaran Lalu Lintas	Volume Capacity Ratio	0,26	0,4	0,57	58%	< 0,4	58%
		Angka Kecelakaan	0	0,00001	0,00001	100%	0,00001	100%
2	Meningkatnya Pelayanan Angkutan	Persentase daerah yang terlayani transportasi umum	45%	55%	55%	100%	73%	75%
3	Meningkatnya kinerja akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan	Nilai AKIP Dinas Perhubungan	71,8	75	82,9	111%	80,01	104%
Rata-rata Capaian						92,01%		

b. Analisa Capaian Kinerja Tahun 2024 dan Perbandingan Kinerja Tahun 2023 dengan Realisasi

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut dalam Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2024 mempunyai 4 (empat) Indikator Kinerja yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.3 : Realisasi Indikator Kinerja Utama Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2024		
			Satuan	Target	Realisasi
1	Meningkatnya Keselamatan dan Kelancaran Lalu Lintas	▪ Volume Capacity Ratio	Rasio	0,4	0,57
		▪ Angka Kecelakaan	Rasio	0,00001	0,00001
2	serta Meningkatkan Pelayanan Angkutan	Persentase daerah yang terlayani transportasi umum	%	55	55
3	Meningkatnya kinerja akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan	Nilai AKIP Dinas Perhubungan	Nilai	75	82,90

Uraian capaian indikator utama pada tabel 3.3 adalah sebagai berikut sebagai berikut :

a) Perbandingan dengan realisasi target tahunan

Tabel 3.4 : Perbandingan realisasi dengan target tahunan

No	Indikator Kinerja	Tahun 2024		Capaian (%)
		Target	Realisasi	
1.	Volume Capacity Ratio	0,4	0,57	58%
2.	Angka Kecelakaan	0,00001	0,00001	100%
3.	Persentase daerah yang terlayani transportasi umum	55%	55%	100%
4	Nilai AKIP Dinas Perhubungan	75	82,90	111%

1. Pencapaian Indikator Ke-1 : Volume Capacity Ratio.

Capaian indikator kinerja volume capacity ratio, dari target rasio 0,4 pada tahun 2024 , kelancaran lalu lintas tercapai dengan rasio 0,57.

Survey traffic counting yang diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut khususnya bidang lalu lintas dan angkutan dilaksanakan pada 7 lokasi ruas jalan yaitu :

- Jalan A. Yani (depan Kompi Senapan C- Lebaran);
- Jalan Samudera;
- Jalan Matah;
- Jalan Pancasila;
- Jalan KH Nawawi;
- Jalan A. Yani (Muslimin)
- Jalan A. Yani (depan Terminal H. Soemarsono PA – Nataru)

Hasil dari survey menunjukkan bahwa kealancaran lalu lintas di kabupaten Tanah Laut masih dalam kondisi yang lancar aman dan terkendali.

Tabel 3.5 : Data Hasil Survey Traffic Counting

No	Nama Ruas	Status Jalan	Tanggal Pelaksanaan	V/C Ratio
1	Jalan A. Yani (Depan Kompi Senapan C)	Nasional	13-Apr-24	0,9
			14-Apr-24	0,9
			15-Apr-24	0,9
2	Jalan Samudera	Provinsi	09-Nov-24	0,37
3	Jalan Matah	Provinsi	10-Nov-24	0,55
4	Jalan Pancasila	Provinsi	30-Nov-24	0,28
5	Jalan KH Nawawi	Provinsi	01-Des-24	0,39
6	Jalan A. Yani (Muslimin)	Nasional	07-Des-24	0,27
7	Jalan A. Yani (Depan Terminal H. Soemarsono PA)	Nasional	28-Des-24	0,54
			29-Des-24	0,61
Rata-rata				0,57

Sumber data : “Hasil Survey Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Tahun 2024”



Gambar 3.1 : Kegiatan Survey Traffic Counting

2. Capaian Indikator Kinerja Ke-2 : Angka Kecelakaan

Capaian indikator kinerja **Angka Kecelakaan** khususnya angkutan tanah laut (LAKATAN) dan angkutan pelajar (LANGKAR) capaiannya 100% karena tidak ada kejadian kecelakaan dalam kurun waktu 2024 atau **ZERO ACCIDENT**.

Rute pelayanan LAKATAN dari Terminal Tanah Habang Pelaihari ke Kecamatan Pelaihari. Sedangkan rute layanan LANGKAR yaitu dari :

- Pelaihari – Sei Jelai (Kec. Tambang Ulang) dan
- Pelaihari – Bajuin.

Awal bulan September 2024 rute pelayanan Trans Banjarbakula koridor 4 yang berangkat dari Terminal Gambut Barakat KM 17 rute pelayanannya diperpanjang hingga Terminal H. Soemarsono, PA Pelaihari Kabupaten Tanah Laut. Dampak dari perubahan rute layanan bus BRT tersebut demikian rute pelayanan LAKATAN juga mengalami perubahan rute layanan yaitu :

- Terminal H. Soemarsono PA – Pasar Eks. Bajuin Plaza, dan
- Terminal H. Soemarsono PA – RSUD H. Boejasin.



Gambar 3.2 : Layanan LAKATAN di RSUD H. Boejasin

3. Capaian Indikator Kinerja Ke-3 : Presentase Daerah yang Terlayani Transportasi Umum.

Pada tahun 2024 ini Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut menargetkan sekitar 55% daerah yang terlayani transportasi angkutan umum dari jumlah kecamatan yang ada di kabupaten tanah laut. Capaian indikator ini mencapai 100%.

Adapun daerah-daerah yang telah tersedia transportasi angkutan umumnya yaitu dengan rute :

- Pelaihari - Tabanio (Kec. Takisung)
- Pelaihari - Batakan (Kec. Panyipatan)

- Pelaihari - Jorong (Kec. Jorong)
- Pelaihari – Bati-Bati (angkutan umum Feeder) Tarif GRATIS
- Pelaihari – Sei Jelai (Kec. Tambang Ulang) Tarif GRATIS
- Pelaihari- Bajuin Tarif GRATIS

Per 1 September 2024 bus BRT Banjarbakula yang semula rutenya hanya sampai di kecamatan bati-bati diperpanjang lintasannya sampai di terminal H. Soemarsono PA di Desa Ambungan Kecamatan Pelaihari (Terminal baru). Selanjutnya bus LAKATAN rutenya dialihkan ke dalam kota Pelaihari dengan rute layanan, yaitu :

- Terminal H. Soemarsono PA – Pasar Eks. Bajuin Plaza, dan
- Terminal H. Soemarsono PA – RSUD H. Boejasin.

b) Perbandingan realisasi dengan tahun-tahun sebelumnya

Tabel 3.6 : Perbandingan dengan realisasi tahun-tahun sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun	
		2023	2024
1	Volume Capacity Ratio	0,26	0,57
2	Angka Kecelakaan	0,00001	0,00001
3	Persentase daerah yang terlayani transportasi umum	55%	55%
4	Nilai AKIP Dinas Perhubungan	71,80	82,90

Perbandingan dengan realisasi tahun-tahun sebelumnya yaitu :

- indikator Volume Capacity Ratio pada tahun 2024 berdasarkan hasil survey traffic counting kelancaran arus lalu lintas rasionya 0,57 meningkat 45% bila dibandingkan dengan hasil survey tahun 2023 , hal ini menunjukkan bahwa kondisi arus lalulintas di Kabupaten Tanah Laut semakin padat namun demikian masih dalam kondisi lancar.

- pada indikator Angka Kecelakaan khususnya pada angkutan umum tanah laut LAKATAN pada tahun 2024 dan 2023 yaitu **ZERO ACCIDENT** (tidak ada kejadian kecelakaan);
- indikator presentase daerah yang terlayani transportasi umum pada tahun 2024 dan tahun 2023 baru mencapai 55% dari jumlah kecamatan yang ada di kabupaten tanah laut yaitu : Pelaihari - Jorong, Pelaihari - Panyipatan, Pelaihari - Takisung, Pelaihari - Bati-bati, Pelaihari - Tambang Ulang dan Pelaihari - Bajuin.
- Indikator Nilai AKIP Dinas Perhubungan pada tahun 2024 capaiannya meningkat lebih baik dibandingkan tahun 2023, nilai AKIP di tahun 2023 adalah 71,80 kategori “BB” sedangkan pada tahun 2024 meningkat menjadi 82,90 (A).

c) Perbandingan realisasi dengan target kinerja Renstra.

Tabel 3.7 : Perbandingan dengan target kinerja Renstra

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Target Akhir RENSTRA	Capaian Tahun 2024 terhadap Target Akhir RENSTRA (%)
1	Volume Capacity Ratio	0,57	< 0,4	58%
2	Angka Kecelakaan	0,00001	0,00001	100%
3	Persentase daerah yang terlayani transportasi umum	55%	73%	75%
4	Nilai AKIP Dinas Perhubungan	82,90	80,01	104%

Tampak pada table 3.6 menunjukan bahwa perbandingan capaian tahun 2024 terhadap target akhir RENSTRA yaitu :

- indikator volume capacity ratio sampai dengan tahun 2024 capaiannya 58% dari target akhir RENSTRA rasio kurang dari 0,4 dan terealisasi 0,57;

- indikator angka kecelakaan sampai dengan tahun 2024 capaiannya 100% dari target akhir RENSTRA rasio 0,00001 terealisasi 0,00001 yaitu **ZERO ACCIDENT** (tidak ada kejadian kecelakaan);
- indikator persentase daerah yang terlayani transportasi umum, sampai dengan tahun 2024 capaiannya sudah 75% dari target akhir RENSTRA diharapkan terjadi penambahan rute layanan angkutan umum 25% lagi sedangkan realisasinya sampai tahun 2024 mencapai 55%.
- Indikator Nilai AKIP Dinas Perhubungan pada tahun 2024 menargetkan nilai AKIP Dinas perhubungan 75 (B) dan ternyata realisasi capaiannya meningkat menjadi 82,90 (A) atau meningkat sebesar 111%.

d) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Tabel 3.8 : Perbandingan realisasi tahun 2024 dengan realisasi tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun		Naik / Turun
		2023	2024	
1	Volume Capacity Ratio	0,26	0,57	Naik
2	Angka Kecelakaan	0,00001	0,00001	Tetap
3	Persentase daerah yang terlayani transportasi umum	55%	55%	Tetap
4	Nilai AKIP Dinas Perhubungan	71,80	82,90	Naik

- Tampak pada table 3.8 diatas menunjukkan bahwa indikator Volume Capacity Ratio dan indikator Nilai AKIP Dinas Perhubungan pada tahun 2024 mengalami peningkatan/kenaikan disbanding tahun sebelumnya sedangkan untuk indikator Angka Kecelakaan dan indikator Persentase daerah yang terlayani transportasi umum capaiannya tetap sama dengan capaian tahun 2023.

Berikut ini adalah upaya-upaya yang dilakukan dalam pencapaian kinerja serta hambatan-hambatannya dalam pencapaian kinerja tersebut :

i. Upaya-upaya yang dilakukan (program dan kegiatan)

Keberhasilan capaian program dan kegiatan pada Dinas Perhubungan didukung oleh 40 orang ASN dan 57 orang PTT serta beberapa faktor yang cukup berperan penting dalam pencapaiannya, diantaranya:

- Kerja sama yang baik dari seluruh personil baik PNS, PTT maupun tenaga teknis dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada pada dinas perhubungan;
- Kerja sama yang baik dari seluruh stakeholder terkait seperti Polres Tanah Laut, Dinas PUPRP, BAPPEDA, Dinas Koperasi dan Perdagangan, DPRKPLH, Dinas Kesehatan, Dinas Pariwisata, Pengadilan Negeri Pelaihari, Kantor Satpol PP dan Damkar, Bagian Umum Sekretaris Daerah, Politeknik Negeri Pelaihari, LSM dan Ketua ORGANDA Kabupaten Tanah Laut dalam pencapaian kinerja dinas perhubungan;
- Mengoptimalkan ketersediaan sarana dan prasarana yang ada di Dinas Perhubungan dalam menunjang kegiatan;

ii. Hambatan-hambatan dalam pencapaian kinerja

Hambatan-hambatan dalam pencapaian kinerja, diantaranya:

- Kurangnya SDM yang mumpuni dalam bidang IT dan bidang teknis perhubungan lainnya;
- Minimnya anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana perhubungan;
- Keterbatasan Kemauan dan kemampuan SDM dalam mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data yang menunjang pencapaian kinerja;
- Minimnya ketersediaan peralatan kerja dalam menunjang pencapaian kinerja.

- iii. Upaya efisiensi yang dilakukan (Langkah-langkah yang dilakukan untuk menilai sejauhmana program kegiatan yang tidak menunjang dilakukan refocussing anggarannya

Setelah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap serapan anggaran tiap bulannya ada sub kegiatan yang anggarannya di kurangi, yaitu :

- Sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor, anggarannya berkurang sebesar Rp. 24.628.464,00;

e) Upaya-upaya perbaikan kedepan

Beberapa upaya perbaikan kedepannya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

- Melakukan reviu dokumen perencanaan dan melakukan pemuktahiran menyesuaikan dengan nomenklatur yang baru;
- Menindaklanjuti laporan hasil evaluasi (LHE) dari inspektorat sesuai dengan rekomendasinya;
- Melakukan perbaikan mengenai penyusunan dan penyajian laporan kinerja (LKj);
- Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan secara berkala;
- Melakukan identifikasi permasalahan dan isu-isu strategis selanjutnya menuangkan kedalam dokumen perencanaan (Renstra 2024-2026);
- Melakukan kerjasama (MoU) dengan STTD dalam hal pemenuhan SDM perhubungan;
- Meningkatkan kapasitas SDM dengan mengirimkan penguji untuk mengikuti diklat penjenjangan dan pada tahun 2025 bidang lalu lintas akan mengirimkan personilnya untuk mengikuti diklat andalalin;
- Menjalin Kerja sama yang baik dari seluruh stakeholder terkait seperti Polres Tanah Laut, Dinas PUPRP, BAPPEDA, Dinas Koperasi dan Perdagangan, DPRKPLH, Dinas Kesehatan, Dinas Pariwisata, Pengadilan Negeri Pelaihari, Kantor Satpol PP dan Damkar, Bagian Umum Sekretaris Daerah, Politeknik Negeri Pelaihari, LSM dan Ketua ORGANDA Kabupaten Tanah Laut dalam pencapaian kinerja dinas perhubungan;
- Dinas Perhubungan juga mengupayakan angkutan massal Bus BRT Banjarkakula beroperasinya sampai di terminal H. Soemarsono PA di

Desa Ambungan Kec. Pelaihari agar berkelanjutan dan membuka rute layanan angkutan LAKATAN ke kecamatan-kecamatan yang belum tersedia angkutan umumnya;

- Menjalin kerjasama dengan PT. PLN dalam hal penerangan jalan umum (PJU).

f) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Anggaran

Tabel 3.9 : Efisiensi Penggunaan Anggaran.

No	Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Efisiensi
1	Meningkatnya Keselamatan dan Kelancaran Lalu Lintas	79%	87,90%	(8,90%)
2	Meningkatnya Pelayanan Angkutan	100%	81,75	18,25%
3	Meningkatnya kinerja akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan	111%	91,62%	19,38%

- Sasaran strategis Meningkatkan Keselamatan dan Kelancaran Lalu Lintas capaiannya hanya 79% sedangkan penyerapan anggaran sebesar 87,90% sehingga pada sasaran strategis ini bisa dikatakan tidak ada efisiensi anggaran.
- Sasaran strategis Meningkatkan Pelayanan Angkutan persentase capaian kinerja mencapai 100% dan dalam dalam Upaya peningkatan pelayanan angkutan menyerap anggaran biaya sekitar 81,75% dari pagu anggaran yang tersedia sehingga pada sasaran setragis in mampu melakukan efisiensi anggaran sebesar 18,25%.
- Sasaran strategis Meningkatkan kinerja akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan di tahun 2024 ini persentase capaiannya adalah 111% sedangkan persentase serapan anggaran hanya mencapai 91,62% dengan demikian ada efisiensi penggunaan anggaran sebesar 19,38%.

Tabel 3.10 : Perbandingan jumlah program dan kegiatan tahun 2024 dengan tahun 2023.

Tahun	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	SILPA (Rp.)
2023	3	13	14.362.783.237	12.798.403.774	89,11%	1.564.379.463
2024	3	19	51.308.313.479	45.422.631.040	88,53%	5.886.052.439

Jumlah program dan kegiatan pada tahun 2024 lebih banyak dibandingkan dengan tahun sebelumnya. pada tahun 2024 ini sebagai penunjang kinerja menggunakan program, kegiatan dan sub kegiatan sebanyak 3 program, 19 kegiatan, dan 40 sub kegiatan.

Seperti tampak pada tabel 3.10 tersebut diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2023 realisasi anggaran sebesar Rp. 12.798.403.774,00 dari pagu anggaran Rp. 14.362.783.237,00 dengan persentase capaian realisasi keuangan 89,11%, sedangkan pada tahun 2024 realisasi anggaran sebesar Rp. 45.422.631.040,00 dari pagu anggaran Rp. 51.308.313.479,00 dengan persentase capaian realisasi keuangan 88,53%, ada **efisiensi sisa anggaran Rp. 5.886.052.439,00.**

Adapun rincian SILPA tersebut terdiri dari :

- Belanja pegawai sebesar Rp. 412.422.235,00;
- Belanja barang dan jasa sebesar Rp. 3.61.2080.681,00; dan
- Belanja modal sebesar Rp. 1.861.549.523,00.

B. Akuntabilitas Keuangan

1. Anggaran dan Realisasi APBD 2024

Tabel 3.11 : Realisasi APBD SKPD Tahun 2024

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih / (Kurang)
		(Rp.)	(Rp.)	
1	2	4	4	5
1.	PENDAPATAN	527.600.000	477.150.000	(50.450.000)
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	527.600.000	477.150.000	(50.450.000)
	▪ Retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum	96.600.000	90.600.000	(6.000.000)
	▪ Retribusi tempat khusus parkir	431.000.000	386.550.000	(44.450.000)
2.	BELANJA	51.308.313.479	45.422.261.040	(5.886.052.439)
2.1.	BELANJA OPERASI	32.114.881.713	28.090.378.797	(4.024.502.916)
	▪ Belanja Pegawai	6.162.662.511	5.750.240.276	(412.422.235)
	▪ Belanja Barang	24.150.219.202	20.538.138.521	(3.612.080.681)
	▪ Belanja Hibah	1.802.000.000	1.802.000.000	0
2.2.	BELANJA MODAL	19.193.431.766	17.331.882.243	(1.861.549.523)
	▪ Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.880.786.624	8.155.741.500	(7.25.045.124)
	▪ Belanja Modal Bangunan dan Gedung	1.117.226.800	1.013.597.032	(103.629.768)
	▪ Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	9.116.053.340	8.086.425.461	(1.029.627.879)
	▪ Belanja Aset Lainnya	79.365.000	76.118.250	(3.246.750)

Dilihat dari tabel tersebut diatas realisasi belanja yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut tahun 2024 ini Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) anggaran sebesar Rp. 5.886.052.439,00 (*Lima milyar delapan ratus delapa puluh enam juta lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah*).

Pada tahun 2024 ini realisasi pendapatan asli daerah (PAD) hanya mencapai **90,44%** dari yang ditargetkan.

2. Anggaran dan Realisasi menurut Sasaran dan Program

Tabel 3.12 : Realisasi Anggaran menurut Sasaran dan Program Tahun 2024

No.	Program/Kegiatan/ dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
A	SEKRETARIAT :			
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	13.618.869.224	12.478.138.881	91,62%
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.809.866	4.220.000	87,74%
	▪ Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.451.358	2.080.000	84,85%
	▪ Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.358.508	2.140.000	90,74%
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.163.162.511	5.750.610.276	93,31%
	▪ Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.162.662.511	5.750.610.276	93,31%
	▪ Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	500.000	-	0,00%
3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.137.482.439	1.060.953.050	93,27%
	▪ Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	7.999.780	6.647.500	83,10%
	▪ Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	500.953.175	442.419.550	88,32%
	▪ Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.999.484	9.900.000	99,01%
	▪ Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	2.400.000	1.920.000	80,00%
	▪ Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	15.000.000	15.000.000	100,00%
	▪ Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	601.130.000	585.066.000	97,33%
4	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.055.378.880	2.839.750.000	92,94%
	▪ Sub kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.055.378.880	2.839.750.000	92,94%
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.426.250.848	2.067.956.878	85,23%
	▪ Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	157.500.000	111.153.070	70,57%
	▪ Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.268.750.848	1.956.803.808	86,25%

No.	Program/Kegiatan/ dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	831.784.680	754.648.677	90,73%
	▪ Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	31.000.000	30.781.100	99,29%
	▪ Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional / Lapangan	259.000.000	247.643.087	95,62%
	▪ Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.900.000	19.774.000	99,37%
	▪ Sub kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	521.884.680	456.450.490	87,46%
JUMLAH		13.618.869.224	12.478.138.881	91,62%
B	BIDANG-BIDANG :			
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	36.451.108.093	31.953.668.076	87,66%
1	Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten / Kota	500.000.000	460.230.800	92,05%
	▪ Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten / Kota	500.000.000	460.230.800	92,05%
2	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	34.481.430.321	30.219.688.022	87,64%
	▪ Sub Kegiatan Penyediaan perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	34.417.430.324	30.182.753.022	87,70%
	▪ Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	63.999.997	36.935.000	57,71%
3	Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	735.441.802	697.015.754	94,78%
	▪ Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kabupaten/ Kota	359.441.372	346.511.000	96,40%
	▪ Sub Kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	259.374.596	235.814.754	90,92%
	▪ Sub Kegiatan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	116.625.834	114.690.000	98,34%

No.	Program/Kegiatan/ dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
4	Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	83.290.970	44.580.000	53,52%
	▪ Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	24.930.970	24.925.000	99,98%
	▪ Sub kegiatan Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin	40.000.000	3.325.000	8,31%
	▪ Sub kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	18.360.000	16.330.000	88,94%
5	Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	650.945.000	532.153.500	81,75%
	▪ Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	650.945.000	532.153.500	81,75%
JUMLAH		36.451.108.093	31.953.668.076	87,66%
C	UPT. PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR			
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	24.962.528	17.361.270	69,55%
1	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	24.962.528	17.361.270	69,55%
	▪ Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.995.670	8.509.400	56,75%
	▪ Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.966.858	8.851.870	88,81%
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	624.314.850	593.827.975	95,12%
1	Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	624.314.850	593.827.975	95,12%
	▪ Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	149.999.850	141.270.000	94,18%
	▪ Sub kegiatan Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala	45.000.000	45.000.000	100,00%
	▪ Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	429.315.000	407.557.975	94,93%
JUMLAH		649.277.378	611.189.245	94,13%

No.	Program/Kegiatan/ dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
D	UPT. TERMINAL DAN PERPARKIRAN			
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	176.885.765	163.537.500	92,45%
1	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	176.885.765	163.537.500	92,45%
	▪ Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	113.873.757	100.537.500	88,29%
	▪ Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	63.012.008	63.000.000	99,98%
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	24.988.000	21.172.000	84,73%
1	Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	24.988.000	21.172.000	84,73%
	▪ Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	24.988.000	21.172.000	84,73%
2	Kegiatan Penertiban Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	188.790.750	-	0,00%
	▪ Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan Kab/Kota	188.790.750	-	0,00%
JUMLAH		390.664.515	184.709.500	47,28%
E	UPT. PELABUHAN DAN PENYEBERANGAN			
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	18.518.269	18.155.000	98,04%
1	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	18.518.269	18.155.000	98,04%
	▪ Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.542.794	13.515.000	99,79%
	▪ Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.975.475	4.640.000	93,26%
II	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	179.876.000	176.770.338	98,27%
1	Kegiatan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	29.876.000	29.613.500	99,12%

No.	Program/Kegiatan/ dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
	<ul style="list-style-type: none"> Sub kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota 	29.876.000	29.613.500	99,12%
2	Kegiatan Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	150.000.000	147.156.838	98,10%
	<ul style="list-style-type: none"> Sub kegiatan Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau 	150.000.000	147.156.838	98,10%
JUMLAH		198.394.269	194.925.338	98,25%
TOTAL ANGGARAN KESELURUHAN		51.308.313.479	45.422.631.040	88,53%

3. Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2023 dan 2024

Tabel 3.13 : Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2023 dan 2024

Tahun	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	SILPA (Rp.)
2023	3	13	14.362.783.237	12.798.403.774	89,11%	1.564.379.463
2024	3	19	51.308.313.479	45.422.631.040	88,53%	5.886.052.439

Terdapat perbedaan jumlah program dan kegiatan untuk tahun 2023 dan tahun 2024 pada tahun anggaran 2023 kegiatannya lebih sedikit namun serapan anggarannya lebih besar dari tahun 2024 dan SILPA di tahun 2024 lebih besar dibanding tahun sebelumnya.

Realisasi belanja gaji dan tunjangan PNS hanya mampu terserap Rp. 5.750.610.276,00 dari Rp. 6.162.662.511,00 sehingga menjadi SILPA sebesar Rp. 412.422.235,00.

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut sebagai perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengelolaan SDM dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada Pemerintah, dan juga merupakan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendukung terwujudnya *good governance*. Dalam perseptif, Laporan Kinerja ini berfungsi sebagai media pertanggung jawaban kepada publik tentang keberhasilan/kegagalan pelaksanaan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan kata lain Laporan Kinerja pada dasarnya merupakan laporan kepada pihak publik/eksternal walaupun manfaatnya lebih banyak kepada pihak internal. Oleh karena itu penyajian informasi dalam Laporan Kinerja harus dipertimbangkan untuk dapat dipergunakan oleh pihak luar.

Hasil evaluasi dan analisis atas pencapaian **Kinerja Utama** yang sudah diuraikan dalam Bab III Akuntabilitas Kinerja dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja **92,01,%** dan tingkat capaian kinerja berkategori **Sangat Memuaskan** dengan rentang capaian lebih dari 90%.

Dalam upaya pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target yang telah ditentukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut mengalami beberapa hambatan dan kendala. Hambatan dan kendala yang dijumpai dalam pencapaian target kinerja sasaran adalah sebagai berikut :

1. Sarana dan prasarana yang tersedia sudah cukup memadai namun belum optimal dalam penggunaannya.
2. Terbatasnya sumber daya manusia dan tenaga khususnya tenaga teknis sebagai pelaksana kegiatan.
3. Kurangnya intensifnya koordinasi antar instansi yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan.
4. Kurangnya komitmen para *leader* untuk menggunakan dan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Untuk mengatasi hambatan dan kendala tersebut di atas diperlukan upaya-upaya penanggulangan antara lain sebagai berikut :

1. Peningkatan sarana dan prasarana yang memadai dalam pelaksanaan kegiatan serta pengoptimalan dalam penggunaannya.
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan tenaga melalui pendidikan dan pelatihan, seminar dan semacamnya serta penambahan personil tenaga pembantu.
3. Membina dan menjaga hubungan yang harmonis dengan instansi lain untuk mempermudah pengkoordinasian.
4. Memberi dukungan kepada para *leader* untuk menggunakan Teknologi informasi dan Komunikasi.

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2024 ini merupakan laporan pertanggung jawaban Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Diharapkan saran serta masukan dari semua pihak guna perbaikan kinerja dimasa yang akan datang.

B. Strategi Peningkatan Kinerja

Dalam rangka peningkatan kinerja yang lebih baik dalam beberapa tahun ke depan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut telah membuat rancangan *road map* pembangunan infrastruktur perhubungan diantaranya sebagai berikut :

1. Membangun sistem angkutan umum masal berbasis jalan dengan menyiapkan Bus Angkutan Feeder dari Terminal H.Soemarsono PA ke dalam kota Pelaihari dan ke kecamatan-kecamatan dalam wilayah kabupaten tanah laut yang belum terjangkau oleh transportasi angkutan umum;
2. Mengupayakan layanan Bus BRT Banjarbakula dari Banjarmasin sampai Terminal H.Soemarsono PA Pelaihari agar terus berkelanjutan;
3. Melengkapi fasilitas terminal H. Soemarsono PA secara bertahap;
4. Melakukan penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten

LAMPIRAN

- ✓ **IKU Dishub**
- ✓ **Pohon Kinerja / Cascading**
- ✓ **Pernyataan Perjanjian Kinerja**
- ✓ **Capaian Per Triwulan (1-4)**
- ✓ **Monev Renstra**
- ✓ **Matrik Keselarasan**



DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TANAH LAUT

Indikator Kinerja Utama (IKU)



DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TANAH LAUT

Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan

Kabupaten : Tanah Laut
 Nama SKPD : Dinas Perhubungan
 Tugas : Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang perhubungan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
 Fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis bidang perhubungan;
 b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang perhubungan;
 c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perhubungan;
 d. Pelaksanaan administrasi dinas;
 e. Pembinaan UPT Dinas;
 f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

No.	Kinerja Utama/ Outcome/Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan Rumus	Penanggungjawab / Sumber Data
1	Meningkatnya Keselamatan dan Kelancaran Lalu Lintas serta Meningkatnya Pelayanan Angkutan Umum	1 Volume Capacity ratio	$v/c \text{ ratio} = \text{jumlah kendaraan} / \text{kapasitas jalan}$	Dinas Perhubungan
		2 Angka kecelakaan	Rumus = Rasio kejadian kecelakaan transportasi per 100.000	Dinas Perhubungan
		3 prosentase daerah yang terlayani transportasi umum	Rumus = $(\text{Jumlah Trayek yang dilayani pada Kabupaten} / \text{Jumlah Kebutuhan Trayek Pada Kabupaten}) \times 100$	Dinas Perhubungan



KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
DANOE SULAIMAN, SH
 NIP. 198011252002121003

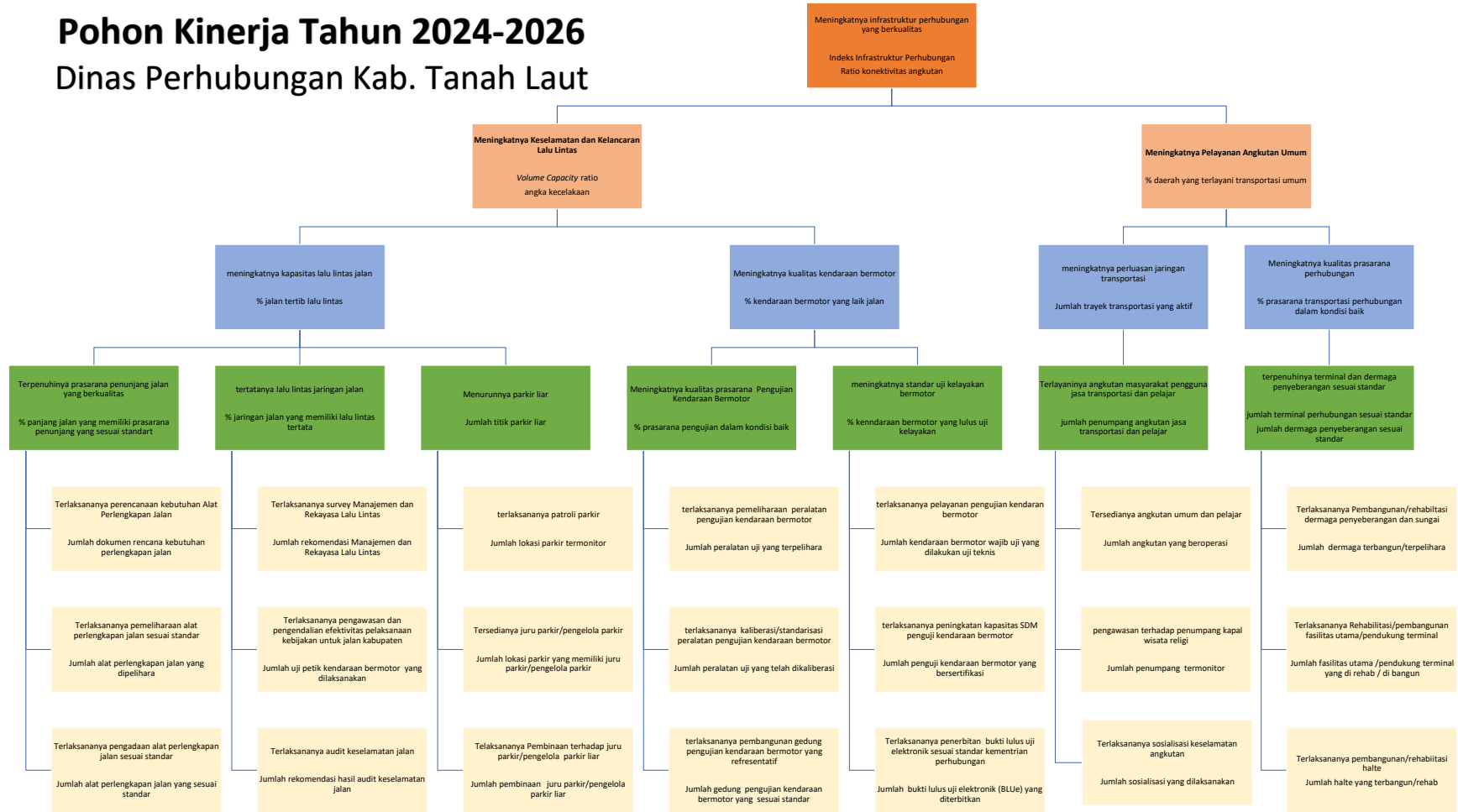
Cascading / Pohon Kinerja



DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TANAH LAUT

Pohon Kinerja Tahun 2024-2026

Dinas Perhubungan Kab. Tanah Laut



Casecading Dinas Perhubungan Tahun 2024 2026

TUJUAN		INDIKATOR TUJUAN		SATUAN	TARGET TAHUN				
					2024	2025	2026		
1	Meningkatnya infrastruktur perhubungan yang berkualitas	1	Indeks Infrastruktur Perhubungan	nilai	26,90	33,49	40,11		
		2	Ratio konektivitas angkutan	ratio	0,56	0,63	0,63		
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah	1	Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai	70,01	75,00	80,01		
SASARAN		INDIKATOR SASARAN		SATUAN	TARGET TAHUN				
					2024	2025	2026		
Tujuan 1 : Meningkatkan infrastruktur perhubungan yang berkualitas									
1	Meningkatnya Keselamatan dan Kelancaran Lalu Lintas serta Meningkatkan Pelayanan Angkutan Umum	1	Volume Capacity ratio	ratio	< 0,4	< 0,4	< 0,4		
		2	Angka kecelakaan	ratio	0.00001	0.00001	0.00001		
		3	prosentase daerah yang terlayani transportasi umum	%	55	64	73		
Tujuan 2 : Meningkatkan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah									
2	Meningkatnya kinerja akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan	1	Nilai AKIP Dinas Perhubungan	Nilai	75	78	80,01		
SASARAN PROGRAM		PROGRAM		INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN			
						2024	2025	2026	
Sasaran 1 : Meningkatkan Keselamatan dan Kelancaran Lalu Lintas serta Meningkatkan Pelayanan Angkutan Umum									
1	Meningkatnya kapasitas lalu lintas jalan	02.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	1	prosentase jalan tertib lalu lintas	%	18	20	23
				2	prosentasi kendaraan bermotor yang laik jalan	%	100	100	100
				3	Jumlah trayek transportasi yang aktif	trayek	6	6	6
				4	prosentase prasarana transportasi perhubungan dalam kondisi baik	%	100	100	100

2	meningkatnya perluasan jaringan transportasi	02.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	1	Jumlah trayek transportasi yang aktif	trayek	3	3	3
Sasaran 2 : Meningkatnya kinerja akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan									
1	Meningkatnya kualitas perencanaan	02.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1	Nilai komponen perencanaan	Nilai	22	23	24
				2	Nilai komponen pengukuran	Nilai	21	22,5	23,5
				3	Nilai komponen pelaporan	Nilai	12	12,5	12,6
				4	Nilai komponen evaluasi internal	Nilai	20	20	20
				5	Hasil survei pelayanan kesekretariatan	Nilai	82	83	85

SASARAN KEGIATAN		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	TARGET TAHUN				
					2024	2025	2026		
2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)									
1	Terpenuhinya prasarana penunjang jalan yang berkualitas	2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1	prosentase panjang jalan yang memiliki prasarana penunjang yang sesuai standart	%	25	33	42
2	Terlaksananya perencanaan kebutuhan Alat Perlengkapan Jalan	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	1	prosentasi panjang jalan yang memiliki prasarana penunjang yang sesuai standart	%	25	33	42
				2	Jumlah halte yang terbangun/rehab	buah	1	3	3
3	Tertatanya lalu lintas jaringan jalan	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1	prosentase jaringan jalan yang memiliki lalu lintas tertata	%	9,71	10,16	11,29
4	Menurunnya parkir liar	2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	1	Jumlah titik parkir liar	lokasi	3		
5	Meningkatnya kualitas prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1	prosentase prasarana pengujian dalam kondisi baik	%	100	100	100
				2	prosentase kendaraan bermotor yang lulus uji kelayakan	%	100	100	100

6	Terlayannya angkutan masyarakat pengguna jasa transportasi dan pelajar	2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	jumlah penumpang angkutan jasa transportasi dan pelajar	orang	40.000	40.000	40.000
7	Terpenuhinya terminal dan dermaga penyeberangan sesuai standar	2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	1	jumlah terminal perhubungan sesuai standar	unit	1	1	1
8	Tertatanya lalu lintas jaringan jalan	2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan	1	prosentase jaringan jalan yang memiliki lalu lintas tertata	%	9,71	10,16	11,29
2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN									
1	Terlayannya angkutan masyarakat pengguna jasa transportasi sungai	2.15.03.2.07	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	1	jumlah penumpang angkutan jasa transportasi sungai	orang	15.000	17.000	18.000
2	Terpenuhinya terminal dan dermaga penyeberangan sesuai standar	2.15.03.2.13	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	1	jumlah dermaga penyeberangan sesuai standar	dermaga	1	1	1
2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
1	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100	100	100
2	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	100	100
3	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1	Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100	100	100
4	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	100	100
5	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	100	100

6	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	100	100
---	--	--------------	--	---	---	--------	-----	-----	-----

SASARAN SUB KEGIATAN		SUB KEGIATAN		INDIKATOR SUB KEGIATAN		SATUAN		TARGET TAHUN		
								2024	2025	2026
1	2.15.02.2.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota									
	Terlaksananya perencanaan kebutuhan Alat Perlengkapan Jalan	2.15.02.2.01.01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1	Jumlah dokumen rencana kebutuhan perlengkapan jalan	dokumen	3	1		
2	2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota									
	Terlaksananya pengadaan alat perlengkapan jalan sesuai standar	2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	1	Jumlah alat perlengkapan jalan yang sesuai standar	buah	1599	1000	1000	
	Terlaksananya pemeliharaan alat perlengkapan jalan sesuai standar	2.15.02.2.02.03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	1	Jumlah alat perlengkapan jalan yang dipelihara	buah	31	100	100	
				2	Jumlah halte yang terbangun/rehab	unit	1	3	3	
3	2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota									
	Terlaksananya survey Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	2.15.02.2.06.01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1	Jumlah rekomendasi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	dokumen	12	12	12	
	Terlaksananya pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan kabupaten	2.15.02.2.06.04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	1	Jumlah uji petik kendaraan bermotor yang dilaksanakan	kegiatan	12	12	12	
	Terlaksananya audit keselamatan jalan	2.15.02.2.06.15	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1	Jumlah rekomendasi hasil audit keselamatan jalan	buah	4	6	8	

4	2.15.02.2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir								
	Terlaksananya patroli parkir	2.15.02.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	1	Jumlah lokasi parkir termonitor	lokasi	29	30	30
				2	Jumlah lokasi parkir yang memiliki juru parkir/pengelola parkir	orang	29	30	30
				3	Jumlah pembinaan juru parkir/pengelola parkir liar	orang	3	3	3
5	2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor								
	Terlaksananya pemeliharaan peralatan pengujian kendaraan bermotor	2.15.02.2.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1	Jumlah peralatan uji yang terpelihara	unit	12	12	12
				2	Jumlah peralatan uji yang telah dikalibrasi	unit	12	12	12
	Terlaksananya pembangunan gedung pengujian kendaraan bermotor yang representatif	2.15.02.2.05.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1	Jumlah gedung pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar	unit		1	
	Terlaksananya penerbitan bukti lulus uji elektronik sesuai standar kementerian perhubungan	2.15.02.2.05.04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1	Jumlah bukti lulus uji elektronik (BLUe) yang diterbitkan	buah	1800	1800	1800
				2	Jumlah kendaraan bermotor wajib uji yang dilakukan uji teknis	unit	2000	2000	2000
	Terlaksananya peningkatan kapasitas SDM penguji kendaraan bermotor	2.15.02.2.05.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1	Jumlah penguji kendaraan bermotor yang bersertifikasi	orang	5	5	5
6	2.15.02.2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								
	Tersedianya angkutan umum dan pelajar	2.15.02.2.09.03	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	Jumlah angkutan yang beroperasi	unit	6	6	6
				2	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	kegiatan	1	1	1

7	2.15.02.2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C								
	Terlaksananya Rehabilitasi/pembangunan fasilitas utama/pendukung terminal	2.15.02.2.03.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	1	Jumlah fasilitas utama /pendukung terminal yang di rehab / di bangun	unit	N/A	2	2
8	2.15.02.2.07 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota								
	Terlaksananya audit keselamatan jalan	2.15.02.2.07.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	1	Jumlah rekomendasi hasil audit keselamatan jalan	buah	12	12	12
	Meningkatnya Kapasitas Penilai Andalalin	2.15.02.2.07.05	Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin	1	Jumlah penilai Andalalin yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi	orang	2	2	2
	Terlaksananya audit keselamatan jalan	2.15.02.2.07.04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	1	Jumlah rekomendasi hasil audit keselamatan jalan	buah	6	8	12
9	2.15.03.2.07 Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota								
	Pengawasan terhadap penumpang kapal wisata religi	2.15.03.2.07.04	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	1	jumlah penumpang termonitor	orang	15000	17000	18000
10	2.15.03.2.13 Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau								
	Terlaksananya Pembangunan/rehabilitasi dermaga penyeberangan dan sungai	2.15.03.2.13.06	Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau	1	Jumlah dermaga terbangun/terpelihara	dermaga	1	1	1
11	2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								

	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.15.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7	6	6
	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.15.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	5	5
12	2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.15.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	36	36	36
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2.15.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	5	5	5
13	2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah								
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.15.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	6	6	6
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.15.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	11	11	11
	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	2.15.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	4	4
	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.15.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	1	1
	Tersedianya Bahan/Material	2.15.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	1	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	2	2	2

	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.15.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	190	190	190
14	2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.15.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	12
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.15.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	12
15	2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2.15.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	1
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.15.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	9	9	9
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.15.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	50	50	50
	Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	2.15.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	
16	2.15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.15.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	3		

Pejanjian Kinerja Tahun 2024



DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TANAH LAUT



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT DINAS PERHUBUNGAN

Jalan A. Syairani Pelaihari 70814 Telp. (0512) 21035

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **DANOE SULAIMAN, SH**
Jabatan : Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **SYAMSIR RAHMAN**
Jabatan : Pj. Bupati Tanah Laut

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 01 Juli 2024

Pihak Kedua
Pj. BUPATI TANAH LAUT,

SYAMSIR RAHMAN

Pihak Pertama
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN,

DANOE SULAIMAN, SH
NIP. 198011252002121003

Perjanjian Kinerja Tahun 2024
Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Keselamatan dan Kelancaran Lalu Lintas serta Meningkatnya Pelayanan Angkutan Umum	▪ Volume Capacity Ratio	0.4
		▪ Angka Kecelakaan	0.00001
		▪ Prosentase daerah yang terlayani transportasi umum	55 %
2	Meningkatnya kinerja akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan	▪ Nilai AKIP Dinas Perhubungan	75

A	Dinas Perhubungan (Bidang-Bidang dan Sekretariat)	Rp.	35.547.461.949
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp.	12.108.389.282
1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp.	4.809.866
	▪ Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp.	2.451.358
	▪ Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp.	2.358.508
2.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp.	5.693.113.711
	▪ Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp.	5.692.613.711
	▪ Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp.	500.000
3.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp.	918.137.833
	▪ Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp.	7.999.780
	▪ Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.	421.608.569
	▪ Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp.	9.999.484
	▪ Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp.	2.400.000
	▪ Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Rp.	15.000.000
	▪ Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp.	461.130.000
4.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp.	2.215.663.880
	▪ Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp.	2.215.663.880
5.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	2.444.879.312
	▪ Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.	151.500.000
	▪ Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.	2.293.379.312
6.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	831.784.680
	▪ Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp.	31.000.000
	▪ Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp.	259.000.000
	▪ Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.	19.900.000
	▪ Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp.	521.884.680
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rp.	23.439.072.667
1.	Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Rp.	500.000.000
	▪ Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Rp.	500.000.000
2.	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Rp.	21.747.275.983
	▪ Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Rp.	21.683.275.986
	▪ Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Rp.	63.999.997

3.	Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Rp.	457.560.714
	▪ Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Rp.	340.550.000
	▪ Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Rp.	9.384.880
	▪ Sub Kegiatan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Rp.	107.625.834
4.	Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Rp.	83.290.970
	▪ Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Rp.	24.930.970
	▪ Sub Kegiatan Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin	Rp.	40.000.000
	▪ Sub Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	Rp.	18.360.000
5.	Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	650.945.000
	▪ Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	650.945.000
B	UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor	Rp.	469.962.378
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp.	24.962.528
1.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp.	24.962.528
	▪ Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.	14.995.670
	▪ Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp.	9.966.858
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rp.	444.999.850
1.	Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rp.	444.999.850
	▪ Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rp.	149.999.850
	▪ Sub Kegiatan Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rp.	45.000.000
	▪ Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rp.	250.000.000
C	UPTD Terminal dan Perparkiran	Rp.	291.775.708
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp.	77.996.958
1.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp.	77.996.958
	▪ Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.	14.984.950
	▪ Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp.	63.012.008
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rp.	213.778.750
1.	Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Rp.	24.988.000
	▪ Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Rp.	24.988.000
2.	Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Rp.	188.790.750
	▪ Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp.	188.790.750
D	UPTD Pelabuhan dan Penyeberangan	Rp.	198.394.269
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp.	18.518.269
1.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp.	18.518.269
	▪ Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.	13.542.794
	▪ Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp.	4.975.475

II	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Rp.	179.876.000
1.	Kegiatan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	29.876.000
	▪ Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	29.876.000
2.	Kegiatan Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Rp.	150.000.000
	▪ Sub Kegiatan Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau	Rp.	150.000.000
TOTAL PAGU ANGGARAN KESELURUHAN		Rp.	36.507.594.304

Pelaihari, 01 Juli 2024

Pihak Kedua
Pj. BUPATI TANAH LAUT,



SYAMSIR RAHMAN

Pihak Pertama
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN,



DANOE SULAIMAN, SH
NIP. 198011252002121003



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

DINAS PERHUBUNGAN

Jalan A. Syairani Pelaihari 70814 Telp. (0512) 21035

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **DIANSYAH, ST**
Jabatan : Kepala Bidang Prasarana dan Keselamatan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **DANOE SULAIMAN, SH**
Jabatan : Kepala Dinas Perhubungan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 01 Juli 2024

Pihak Kedua
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN,

Pihak Pertama
KEPALA BIDANG PRASARANA DAN KESELAMATAN,


DANOE SULAIMAN, SH
NIP. 198011252002121003


DIANSYAH, ST
NIP. 197704042009031009

Perjanjian Kinerja Tahun 2024
Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kapasitas lalu lintas jalan	prosentase prasarana transportasi perhubungan dalam kondisi baik	100%

1	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rp. 22.097.210.863
1	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Rp. 21.747.275.983
	▪ Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Rp. 21.683.275.986
	▪ Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Rp. 63.999.997
2	Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Rp. 349.934.880
	▪ Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Rp. 340.550.000
	▪ Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Rp. 9.384.880
TOTAL ANGGARAN		Rp. 22.097.210.863

Pelaihari, 01 Juli 2024

Pihak Kedua
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN,



DANOE SULAIMAN, SH
NIP. 198011252002121003

Pihak Pertama
KEPALA BIDANG PRASARANA DAN KESELAMATAN,



DIANSYAH, ST
NIP. 197704042009031009



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT DINAS PERHUBUNGAN

Jalan A. Syairani Pelaihari 70814 Telp. (0512) 21035

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ANDRI TRIYANTO CAHYONOA.Md.LLASD**
Jabatan : **Plt. Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan**

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **DANOE SULAIMAN, SH**
Jabatan : **Kepala Dinas Perhubungan**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 01 Juli 2024

Pihak Kedua
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN,

DANOE SULAIMAN, SH
NIP. 198011252002121003

Pihak Pertama
Plt. KEPALA BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN,

ANDRI TRIYANTO CAHYONO, A.Md. LLASDP
NIP. 198212132003121004

Perjanjian Kinerja Tahun 2024
Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kapasitas lalu lintas jalan	▪ prosentase jalan tertib lalu lintas	18 %
		▪ Jumlah trayek transportasi yang aktif	6 Trayek

1	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rp. 1.341.861.804
1	Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Rp. 500.000.000
	▪ Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Rp. 500.000.000
2	Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Rp. 107.625.834
	▪ Sub Kegiatan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Rp. 107.625.834
3	Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Rp. 83.290.970
	▪ Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Rp. 24.930.970
	▪ Sub Kegiatan Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin	Rp. 40.000.000
	▪ Sub Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	Rp. 18.360.000
4	Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 650.945.000
	▪ Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 650.945.000
TOTAL ANGGARAN		Rp. 1.341.861.804

Pelaihari, 01 Juli 2024

Pihak Kedua
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN,



DANOE SULAIMAN, SH
NIP. 198011252002121003

Pihak Pertama
Pit. KEPALA BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN,



ANDRI TRIYANTO CAHYONO, A.Md. LLASDP
NIP. 198212132003121004



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

DINAS PERHUBUNGAN

Jalan A. Syairani Pelaihari 70814 Telp. (0512) 21035

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **NOVAN ANDIDYAN, S. Tr**
Jabatan : **Plt. Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor**

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

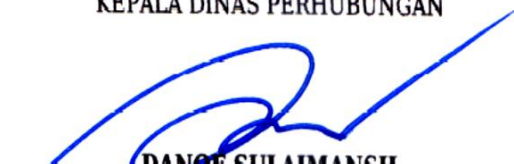
Nama : **DANOE SULAIMAN, SH**
Jabatan : **Kepala Dinas Perhubungan**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN


DANOE SULAIMANSH
NIP. 198011252002121003

Tanah Laut, 1 Juli 2024

Pihak Pertama
PLT. KEPALA UPT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR


NOVAN ANDIDYAN, S.STr
NIP. 198302102010011001

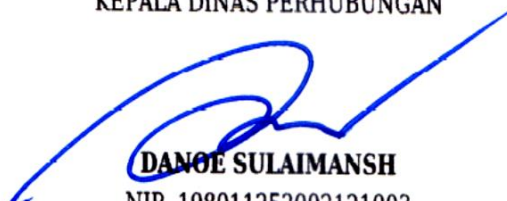
Perjanjian Kinerja Tahun 2024
Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor	▪ prosentase prasarana pengujian dalam kondisi baik	100%
		▪ prosentase kendaraan bermotor yang lulus uji kelayakan	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.1	Terlaksananya pemeliharaan peralatan pengujian kendaraan bermotor	▪ Jumlah peralatan uji yang terpelihara	12 unit
		▪ Jumlah peralatan uji yang telah dikalibrasi	12 unit
1.2	Terlaksananya pembangunan gedung pengujian kendaraan bermotor yang representatif	Jumlah gedung pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar	1 unit
1.3	Terlaksananya penerbitan bukti lulus uji elektronik sesuai standar kementerian perhubungan	▪ Jumlah bukti lulus uji elektronik (BLUe) yang diterbitkan	1.800 buah
		▪ Jumlah kendaraan bermotor wajib uji yang dilakukan uji teknis	2.000 unit
1.4	Terlaksananya peningkatan kapasitas SDM penguji kendaraan bermotor	Jumlah penguji kendaraan bermotor yang bersertifikasi	5 orang

I	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rp.	444.999.850
1.	Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rp.	444.999.850
	▪ Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rp.	149.999.850
	▪ Sub Kegiatan Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rp.	45.000.000
	▪ Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rp.	250.000.000
TOTAL PAGU ANGGARAN KESELURUHAN		Rp.	444.999.850

Pihak Kedua
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN


DANGO SULAIMANSH
NIP. 198011252002121003

Tanah Laut, 1 Juli 2024

Pihak Pertama

PLT. KEPALA UPT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR


NOVAN ANDIDYAN, S.STr
NIP. 198302102010011001



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

DINAS PERHUBUNGAN

Jalan A. Syairani Pelaihari 70814 Telp. (0512) 21035

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **RISWAN AKBAR, S.Sos**
Jabatan : Kepala UPT Terminal dan Perparkiran

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

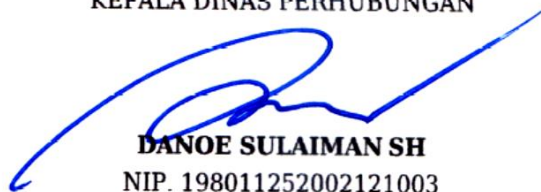
Nama : **DANOE SULAIMAN, SH**
Jabatan : Kepala Dinas Perhubungan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN


DANOE SULAIMAN SH
NIP. 198011252002121003

Tanah Laut, 1 Juli 2024
Pihak Pertama
KEPALA UPT TERMINAL DAN PERPARKIRAN


RISWAN AKBAR S.Sos
NIP. 198205012007011007

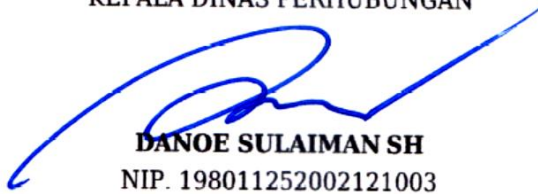
Perjanjian Kinerja Tahun 2024
Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terpenuhinya terminal dan dermaga penyeberangan sesuai standar	jumlah terminal perhubungan sesuai standar	1 unit
2	Menurunnya parkir liar	Jumlah titik parkir liar	3 lokasi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.1	Terlaksananya Rehabilitasi/ pembangunan fasilitas utama/ pendukung terminal	Jumlah fasilitas utama /pendukung terminal yang direhab / di bangun	1 unit
2.1	Terlaksananya patroli parkir	▪ Jumlah lokasi parkir termonitor	29 lokasi
		▪ Jumlah lokasi parkir yang memiliki juru parkir/pengelola parkir	29 orang
		▪ Jumlah pembinaan juru parkir/pengelola parkir liar	3 orang

I	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rp.	213.778.750
1.	Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Rp.	24.988.000
	▪ Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Rp.	24.988.000
2.	Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Rp.	188.790.750
	▪ Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp.	188.790.750
TOTAL ANGGARAN		Rp.	213.778.750

Pihak Kedua
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN


DANOE SULAIMAN SH
NIP. 198011252002121003

Tanah Laut, 1 Juli 2024
Pihak Pertama
KEPALA UPT TERMINAL DAN PERPARKIRAN


RJSWAN AKBAR S.Sos
NIP. 198205012007011007



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT DINAS PERHUBUNGAN

Jalan A. Syairani Pelaihari 70814 Telp. (0512) 21035

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ABDURRAHMAN SIDIK, S.I.Kom**
Jabatan : Kepala UPT Pelabuhan dan Penyeberangan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **DANOE SULAIMAN, SH**
Jabatan : Kepala Dinas Perhubungan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

DANOE SULAIMAN SH
NIP. 198011252002121003

Tanah Laut, 1 Juli 2024
Pihak Pertama
KEPALA UPT PELABUHAN

ABDURRAHMAN SIDIK S.I.Kom
NIP. 197903192008011017

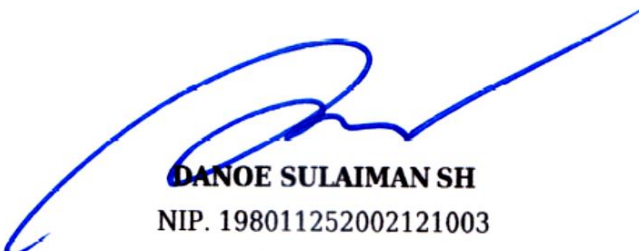
Perjanjian Kinerja Tahun 2024
Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terlayannya angkutan masyarakat pengguna jasa transportasi sungai	jumlah penumpang angkutan jasa transportasi sungai	15.000 orang
2	Terpenuhinya terminal dan dermaga penyeberangan sesuai standar	jumlah dermaga penyeberangan sesuai standar	1 dermaga


No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Pengawasan terhadap penumpang kapal wisata religi	jumlah penumpang termonitor	15.000 orang
2	Terlaksananya Pembangunan/ rehabilitasi dermaga penyeberangan dan sungai	Jumlah dermaga terbangun/terpelihara	1 dermaga

I	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Rp.	179.876.000
1.	Kegiatan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	29.876.000
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota 	Rp.	29.876.000
2.	Kegiatan Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Rp.	150.000.000
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sub Kegiatan Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau 	Rp.	150.000.000
TOTAL ANGGARAN		Rp.	179.876.000

Pihak Kedua
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN


DANOE SULAIMAN SH
NIP. 198011252002121003

Tanah Laut, 1 Juli 2024
Pihak Pertama
KEPALA UPT PELABUHAN


ABDURRAHMAN SIDIK S.I.Kom
NIP. 197903192008011017



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

DINAS PERHUBUNGAN

Jalan A. Syairani Pelaihari 70814 Telp. (0512) 21035

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SURIADI HABİYANI, S.I.Kom**
Jabatan : Kepala Seksi Prasarana

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **DIANSYAH, ST**
Jabatan : Kepala Bidang Prasarana dan Keselamatan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 01 Juli 2024

Pihak Kedua
KEPALA BIDANG PRASARANA DAN KESELAMATAN,

Pihak Pertama
KEPALA SEKSI PRASARANA,


DIANSYAH, ST
NIP. 197704842009031009


SURIADI HABİYANI, S.I.Kom.
NIP. 197804172009011001

Perjanjian Kinerja Tahun 2024
Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terlaksananya perencanaan kebutuhan Alat Perlengkapan Jalan	prosentasi panjang jalan yang memiliki prasarana penunjang yang sesuai standart	25%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.1	Terlaksananya pengadaan alat perlengkapan jalan sesuai standar	Jumlah alat perlengkapan jalan yang sesuai standar	1.599 buah
1.2	Terlaksananya pemeliharaan alat perlengkapan jalan sesuai standar	▪ Jumlah alat perlengkapan jalan yang dipelihara	31 buah
		▪ Jumlah halte yang terbangun/rehab	1 unit

I	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rp. 21.747.275.983
1	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Rp. 21.747.275.983
	▪ Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Rp. 21.683.275.986
	▪ Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Rp. 63.999.997
	TOTAL ANGGARAN	Rp. 21.747.275.983

Pelaihari, 01 Juli 2024

Pihak Kedua
KEPALA BIDANG PRASARANA DAN KESELAMATAN,

Pihak Pertama
KEPALA SEKSI PRASARANA,



DIANSYAH, ST
NIP. 197704042009031009



SURIADI HABIYANI, S.I.Kom.
NIP. 197804172009011001



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT DINAS PERHUBUNGAN

Jalan A. Syairani Pelaihari 70814 Telp. (0512) 21035

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SUPIANSYAH, S.Kom**
Jabatan : Kepala Seksi Keselamatan dan Pengembangan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **DIANSYAH, ST**
Jabatan : Kepala Bidang Prasarana dan Keselamatan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 01 Juli 2024

Pihak Kedua
KEPALA BIDANG PRASARANA DAN KESELAMATAN,

Pihak Pertama
KEPALA SEKSI KESELAMATAN DAN PENGEMBANGAN,


DIANSYAH, ST
NIP. 197704042009031009


SUPIANSYAH, S. Kom.
NIP. 197905082006041019

Perjanjian Kinerja Tahun 2024
Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Tertatanya lalu lintas jaringan jalan	prosentase jaringan jalan yang memiliki lalu lintas tertata	9,71%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.1	Terlaksananya pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan kabupaten	Jumlah uji petik kendaraan bermotor yang dilaksanakan	12 kegiatan
1.2	Terlaksananya audit keselamatan jalan	Jumlah rekomendasi hasil audit keselamatan jalan	4 buah

I	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rp.	349.934.880
1	Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Rp.	349.934.880
	▪ Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Rp.	340.550.000
	▪ Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Rp.	9.384.880
TOTAL ANGGARAN			Rp. 349.934.880

Pelaihari, 01 Juli 2024

Pihak Kedua
KEPALA BIDANG PRASARANA DAN KESELAMATAN,

Pihak Pertama
KEPALA SEKSI KESELAMATAN DAN PENGEMBANGAN,


DIANSYAH, ST
NIP. 197704042009031009


SUPIANSYAH, S. Kom.
NIP. 197905082006041019



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

DINAS PERHUBUNGAN

Jalan A. Syairani Pelaihari 70814 Telp. (0512) 21035

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ANDRI TRIYANTO CAHYONOA.Md.LLASD**
Jabatan : Kepala Seksi Lalu Lintas

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **ANDRI TRIYANTO CAHYONOA.Md.LLASD**
Jabatan : Plt. Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 01 Juli 2024

Pihak Kedua
Plt. KEPALA BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN,

ANDRI TRIYANTO CAHYONO, A.MD. LLASDP
NIP. 198212132003121004

Pihak Pertama
KEPALA SEKSI LALU LINTAS,

ANDRI TRIYANTO CAHYONO, A.Md. LLASDP
NIP. 198212132003121004

Perjanjian Kinerja Tahun 2024
Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terpenuhinya prasarana penunjang jalan yang berkualitas	prosentase panjang jalan yang memiliki prasarana penunjang yang sesuai standart	25%
2	Tertatanya lalu lintas jaringan jalan	prosentase jaringan jalan yang memiliki lalu lintastertata	9,71%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terlaksananya perencanaan kebutuhan Alat Perlengkapan Jalan	Jumlah dokumen rencana kebutuhan perlengkapan jalan	3 Dokumen
2	Terlaksananya survey Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah rekomendasi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	12Dokumen
3	Terlaksananya audit keselamatan jalan	Jumlah rekomendasi hasil audit keselamatan jalan	12 buah
4	Meningkatnya Kapasitas Penilai Andalalin	Jumlah penilai Andalalin yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi	2 orang

1	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rp. 1.341.861.804
1	Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Rp. 500.000.000
	▪ Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Rp. 500.000.000
2	Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Rp. 107.625.834
	▪ Sub Kegiatan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Rp. 107.625.834
3	Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Rp. 83.290.970
	▪ Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Rp. 24.930.970
	▪ Sub Kegiatan Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin	Rp. 40.000.000
	▪ Sub Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	Rp. 18.360.000
TOTAL ANGGARAN		Rp. 690.916.804

Pelaihari, 01 Juli 2024

Pihak Kedua
Plt. KEPALA BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN,



ANDRI TRIYANTO CAHYONO, A.MD. LLASDP
NIP. 198212132003121004

Pihak Pertama
KEPALA SEKSI LALU LINTAS,



ANDRI TRIYANTO CAHYONO, A.MD. LLASDP
NIP. 198212132003121004



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

DINAS PERHUBUNGAN

Jalan A. Syairani Pelaihari 70814 Telp. (0512) 21035

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **RAHMAT HIDAYAT, A.Md**
Jabatan : Kepala Seksi Angkutan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **ANDRI TRIYANTO CAHYONOA.Md.LLASD**
Jabatan : Plt. Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 01 Juli 2024

Pihak Kedua
Plt. KEPALA BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN,

ANDRI TRIYANTO CAHYONO, A.Md. LLASDP
NIP. 198212132003121004

Pihak Pertama
KEPALA SEKSI ANGKUTAN,

RAHMAT HIDAYAT, A.Md.
NIP. 197905122008011016

Perjanjian Kinerja Tahun 2024
Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut

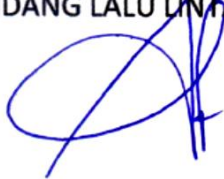
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terlayannya angkutan masyarakat pengguna jasa transportasi dan pelajar	jumlah penumpang angkutan jasa transportasi dan pelajar	40.000 orang

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Tersedianya angkutan umum dan pelajar	▪ Jumlah angkutan yang beroperasi	6 unit
		▪ Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	1 kegiatan

1	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rp. 650.945.000
1	Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 650.945.000
	▪ Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 650.945.000
TOTAL ANGGARAN		Rp. 650.945.000

Pelaihari, 01 Juli 2024

Pihak Kedua
Pit. KEPALA BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN,



ANDRI TRIYANTO CAHYONO, A.Md. LLASDP
NIP. 198212132003121004

Pihak Pertama
KEPALA SEKSI ANGKUTAN,



RAHMAT HIDAYAT, A.Md.
NIP. 197905122008011016



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

DINAS PERHUBUNGAN

Jalan A. Syairani Pelaihari 70814 Telp. (0512) 21035

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Tedy Mulyana, ST, MT**
Jabatan : Sekretaris Dinas

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Danoë Sulaiman, SH**
Jabatan : Kepala Dinas Perhubungan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

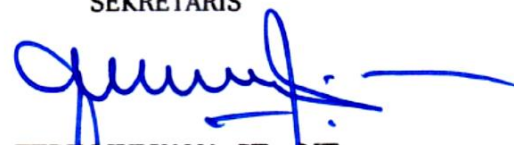
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanah Laut, 01 Juli 2024

Pihak Kedua
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN


DANOË SULAIMAN, SH
NIP. 198011252002121003

Pihak Pertama
SEKRETARIS


TEDY MULYANA, ST., MT
NIP. 198006172005011007

Perjanjian Kinerja Tahun 2024
Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas perencanaan	▪ Nilai komponen perencanaan	22
		▪ Nilai komponen pengukuran	21
		▪ Nilai komponen pelaporan	12
		▪ Nilai komponen evaluasi internal	20
		▪ Hasil survei pelayanan kesekretariatan	82

1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp.	12.108.389.282
1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp.	4.809.866
	▪ Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp.	2.451.358
	▪ Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp.	2.358.508
2.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp.	5.693.113.711
	▪ Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp.	5.692.613.711
	▪ Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp.	500.000
3.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp.	918.137.833
	▪ Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp.	7.999.780
	▪ Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.	421.608.569
	▪ Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp.	9.999.484
	▪ Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp.	2.400.000
	▪ Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Rp.	15.000.000
	▪ Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp.	461.130.000
4.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp.	2.215.663.880
	▪ Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp.	2.215.663.880
5.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	2.444.879.312
	▪ Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.	151.500.000
	▪ Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.	2.293.379.312
6.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	831.784.680

▪ Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp.	31.000.000
▪ Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp.	259.000.000
▪ Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.	19.900.000
▪ Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp.	521.884.680

TOTAL ANGGARAN

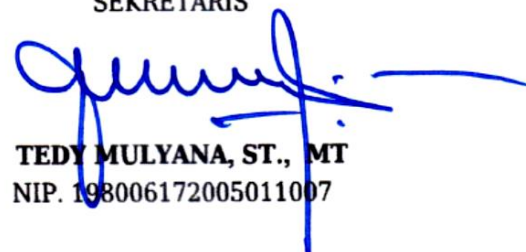
Rp. 12.108.389.282

Tanah Laut, 01 Juli 2024

Pihak Kedua
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN


DANOE SULAIMAN, SH
NIP. 198011252002121003

Pihak Pertama
SEKRETARIS


TEDY MULYANA, ST., MT
NIP. 198006172005011007



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

DINAS PERHUBUNGAN

Jalan A. Syairani Pelaihari 70814 Telp. (0512) 21035

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Daryono**
Jabatan : Kasubag Perencanaan dan Keuangan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA


Nama : **Tedy Mulyana, ST, MT**
Jabatan : Sekretaris Dinas

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
SEKRETARIS




TEDY MULYANA, ST., MT
NIP. 198006172005011007

Tanah Laut, 1 Juli 2024

Pihak Pertama

KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN



DARYONO, A.Md
NIP. 197804052005011011

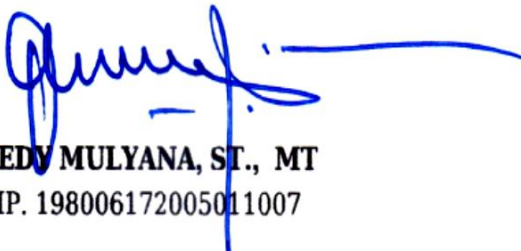
Perjanjian Kinerja Tahun 2024
Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%
2	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen
2	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan
3	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang / Bulan
4	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5 Dokumen

I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp.	5.697.923.577
1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp.	4.809.866
	▪ Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp.	2.451.358
	▪ Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp.	2.358.508
2.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp.	5.693.113.711
	▪ Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp.	5.692.613.711
	▪ Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp.	500.000
TOTAL ANGGARAN		Rp.	5.697.923.577


Pihak Kedua
SEKRETARIS


TEDY MULYANA, ST., MT
NIP. 198006172005011007

Tanah Laut, 1 Juli 2024

Pihak Pertama

KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN


DARYONO, A.Md
NIP. 197804052005011011



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

DINAS PERHUBUNGAN

Jalan A. Syairani Pelaihari 70814 Telp. (0512) 21035

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Harni Rahayu, S.I.Kom**
Jabatan : Kasubag Umum dan Kepegawaian

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

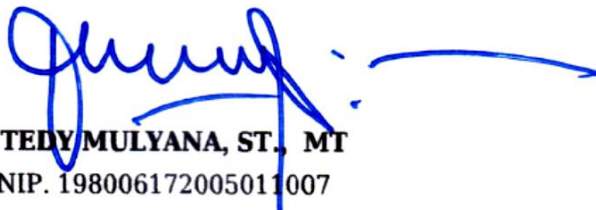
Nama : **Tedy Mulyana, ST, MT**
Jabatan : Sekretaris Dinas

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
SEKRETARIS


TEDY MULYANA, ST., MT
NIP. 198006172005011007

Tanah Laut, 1 Juli 2024

Pihak Pertama
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN


HARNI RAHAYU, S.I.Kom
NIP. 198008102008012040

Perjanjian Kinerja Tahun 2024
Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%
2	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%
3	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%
4	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%

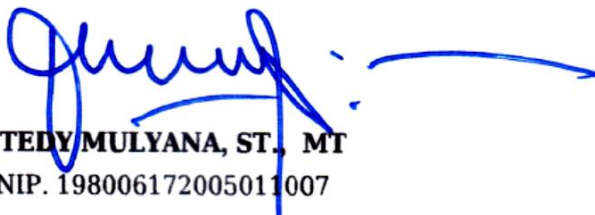
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.1	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 paket
1.2	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 paket
1.3	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket
1.4	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	1 Dokumen
1.5	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 paket
1.6	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	190 Laporan
2.1	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 unit
3.1	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
3.2	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
4.1	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit
4.2	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit
4.3	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit
4.4	Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit

1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp.	6.410.465.705
3.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp.	918.137.833
	▪ Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp.	7.999.780
	▪ Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.	421.608.569
	▪ Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp.	9.999.484
	▪ Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp.	2.400.000
	▪ Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Rp.	15.000.000
	▪ Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp.	461.130.000
4.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp.	2.215.663.880
	▪ Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp.	2.215.663.880
5.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	2.444.879.312
	▪ Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.	151.500.000
	▪ Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.	2.293.379.312
6.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	831.784.680
	▪ Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp.	31.000.000


▪ Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp.	259.000.000
▪ Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.	19.900.000
▪ Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp.	521.884.680
TOTAL ANGGARAN		Rp. 6.410.465.705

Pihak Kedua
SEKRETARIS



TEDY MULYANA, ST., MT
NIP. 198006172005011007

Tanah Laut, 1 Juli 2024
Pihak Pertama
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN



HARNI RAHAYU, S.I.Kom
NIP. 198008102008012040



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

DINAS PERHUBUNGAN

Jalan A. Syairani Pelaihari 70814 Telp. (0512) 21035

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **NOVAN ANDIDYAN, S. Tr**
Jabatan : Kasubag TU UPT Pengujian Kendaraan Bermotor

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **NOVAN ANDIDYAN, S. Tr**
Jabatan : Plt. Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN


DANOË SULAIMANSH
NIP. 198011252002121003

Tanah Laut, 1 Juli 2024
Pihak Pertama
PLT. KEPALA UPT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR


NOVAN ANDIDYAN, S.Tr
NIP. 198302102010011001


**Perjanjian Kinerja Tahun 2024
Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.1	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket
1.2	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket

I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp.	24.962.528
1.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp.	24.962.528
	▪ Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.	14.995.670
	▪ Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp.	9.966.858
TOTAL PAGU ANGGARAN KESELURUHAN		Rp.	24.962.528

Pihak Kedua
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN


DANOË SULAIMANSH
NIP. 198011252002121003

Tanah Laut, 1 Juli 2024
Pihak Pertama
PLT. KEPALA UPT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR


NOVAN ANDIDYAN, S.STr
NIP. 198302102010011001



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

DINAS PERHUBUNGAN

Jalan A. Syairani Pelaihari 70814 Telp. (0512) 21035

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ROSARIA YUNIZA, A.Md**
Jabatan : Kasubag TU UPT Terminal dan Perpajakan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA


Nama : **RISWAN AKBAR, S.Sos**
Jabatan : Kepala UPT Terminal dan Perpajakan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
KEPALA UPT TERMINAL DAN PERPARKIRAN


RISWAN AKBAR S.Sos
NIP. 198205012007011007

Tanah Laut, 1 Juli 2024
Pihak Pertama
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA TERMINAL
DAN PERPARKIRAN


ROSARIA YUNIZA A.Md
NIP. 197306072007012013

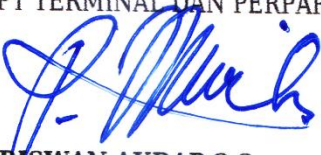
Perjanjian Kinerja Tahun 2024
Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%

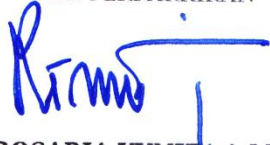
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.1	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket
1.2	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket

I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp.	77.996.958
1.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp.	77.996.958
	▪ Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.	14.984.950
	▪ Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp.	63.012.008
TOTAL PAGU ANGGARAN KESELURUHAN		Rp.	77.996.958

Pihak Kedua
KEPALA UPT TERMINAL DAN PERPARKIRAN


RISWAN AKBAR S.Sos
NIP. 198205012007011007

Tanah Laut, 1 Juli 2024
Pihak Pertama
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA TERMINAL
DAN PERPARKIRAN


ROSARIA YUNIZA A.Md
NIP. 197306072007012013



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT DINAS PERHUBUNGAN

Jalan A. Syairani Pelaihari 70814 Telp. (0512) 21035

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **PIDI MASHUDI JAMIL, S.H.**
Jabatan : Kasubag TU UPT Pelabuhan dan Penyeberangan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **ABDURRAHMAN SIDIK, S.I.Kom**
Jabatan : Kepala UPT Pelabuhan dan Penyeberangan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
KEPALA UPT PELABUHAN

ABDURRAHMAN SIDIK S.I.Kom
NIP. 197903192008011017

Tanah Laut, 1 Juli 2024

Pihak Pertama
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA PELABUHAN

PIDI MASHUDI JAMIL S.H.
NIP. 197905212011011001


Perjanjian Kinerja Tahun 2024
Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.1	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket
1.2	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket

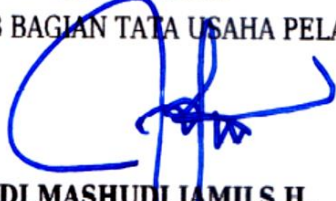
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp.	18.518.269
1.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp.	18.518.269
	▪ Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.	13.542.794
	▪ Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp.	4.975.475
TOTAL ANGGARAN		Rp.	18.518.269

Pihak Kedua
KEPALA UPT PELABUHAN



ABDURRAHMAN SIDIK S.I.Kom
NIP. 197903192008011017

Tanah Laut, 1 Juli 2024
Pihak Pertama
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA PELABUHAN



PIDI MASHUDI JAMILS.H.
NIP. 197905212011011001

Capaian Per Triwulan (Triwulan 1 – 4)



DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TANAH LAUT

Matrik Keselarasan



DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TANAH LAUT

Money Renstra



DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TANAH LAUT